



LAPORAN ANTARA

KAJIAN PEMBANGUNAN EKONOMI TERPADU DI KOTA SOLOK 2021-2026



Kerjasama
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SOLOK
dengan
**PUSAT STUDI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
(PSKP-FEUA)**
2021

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya hingga laporan antara Kajian Pembangunan Ekonomi Terpadu Kota Solok Tahun 2021 telah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan akhir ini menganalisis interaksi antar sektor ekonomi Kota Solok dan merekomendasikan rumusan kebijakan ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan partisipasi aktif terutama dinas/instansi dan tim teknis yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan informasi serta memberikan masukan pada Kajian Pembangunan Ekonomi Terpadu Kota Solok ini.

Kami berharap hasil Kajian Pembangunan Ekonomi Terpadu Kota Solok ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam merumuskan strategi dan kebijakan penguatan fondasi pembangunan ekonomi Kota Solok ke depan, kami juga berharap kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak bagi penyempurnaan laporan ini.

Solok, September 2021
Kepala Balitbang
Kota Solok

MARWIS, SE, MM
NIP. 19631231 199003 1 244
Pembina Utama Muda (IV/c)

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sasaran	5
1.5. Lokasi Kegiatan	5
1.6. Ruang Lingkup Kajian	5
BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL	7
2.1. Konsep Pembangunan Ekonomi	7
2.2. Konsep Ekonomi Inklusif	10
2.3. Konsep Indikator Pembangunan Ekonomi	14
2.4. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	16
2.5. Teori Pembangunan Ekonomi Wilayah	27
2.6. Peran Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Perkonomian	31
BAB 3 METODOLOGI	33
3.1. Pendekatan Pelaksanaan	33
3.2. Metode Pengumpulan Data	33
3.3. Pengolahan Data	33
3.4. Metode Analisa Data	33
3.5. Analisis Input Output	36
3.6. Metode RAS	40
BAB 4 KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA SOLOK	42
4.1. PDRB dan PDRB per Kapita	42
4.1.1. Perkembangan PDRB Kota Solok	43
4.1.2. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Solok	47
4.1.3. Perbandingan PDRB per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	49
4.2. Laju Pertumbuhan	51
4.3. Inflasi	58
4.3.1. Perkembangan Inflasi Kota Solok	58
4.3.2. Inflasi menurut Kelompok Barang Dan Jasa	60
4.4. Pengangguran dan Kesempatan Kerja	62
4.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63

4.5. Kondisi Kemiskinan di Kota Solok	68
4.5.1. Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan	69
4.5.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan	71
4.5.3. Indeks Keparahan Kemiskinan	72
4.6. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	73
4.7. Potensi Ekonomi Daerah	75
4.7.1. Tipology Klasen	75
4.7.2. Location Quotient (LQ)	77
4.7.3. Analisis Shiftshare	78
4.7.4. Analisis Overlay	79
4.8. Analisis Input Output Kota Solok	81
4.8.1. Kostruksi Tabel Input Output Kota Solok	81
4.8.2. Analisis Dampak dan Pengganda	81
4.7.3. Analisis Sektor Unggulan	89
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	94
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Rekomendasi	96

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1.	Matrix dasar Input Output	37
Tabel 4.1.	PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020	45
Tabel 4.2.	Distribusi PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (%), 2016-2020	46
Tabel 4.3.	PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Juta Rupiah), 2016-2020	49
Tabel 4.4.	Perbandingan Inflasi dan andil inflasi Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020	61
Tabel 4.5.	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020	69
Tabel 4.6.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020	70
Tabel 4.7.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020	72
Tabel 4.8.	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020	73
Tabel 4.9.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2020	74
Tabel 4.10.	Perhitungan Tipologi Klassen Kota Solok, 2016-2020	76
Tabel 4.11.	Hasil Perhitungan LQ Kota Solok, 2016-2020	77
Tabel 4.12.	Nilai Shiftshare Kota Solok, 2016-2020	78
Tabel 4.13.	Hasil Analisis Overlay (Typology Klassen, LQ, dan Shift Share) Kota Solok, 2016-2020	80
Tabel 4.14.	Struktur Permintaan dan Penawaran Tabel I-O Kota Solok 2019 (Rp Juta)	82
Tabel 4.15.	Distribusi Struktur Permintaan dan Penawaran Tabel I-O Kota Solok (%)	83
Tabel 4.16.	Struktur Output tabel I-O Kota Solok	84
Tabel 4.17.	Struktur Nilai Tambah Bruto tabel I-O Kota Solok	85
Tabel 4.18.	Struktur Permintaan Akhir tabel I-O Kota Solok	86
Tabel 4.19.	Dampak Kenaikan Permintaan Akhir terhadap Sektor-Sektor Ekonomi Kota Solok	87
Tabel 4.20.	Indeks Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan	91
Tabel 4.21.	Sektor-sektor unggulan	92
Tabel 4.22.	Interaksi Sektor-Sektor dalam Perekonomian Kota Solok	93

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1.	Pilar Pembangunan Ekonomi Inklusif	18
Gambar 2.2.	Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	27
Gambar 4.1.	Perkembangan PDRB Kota Solok (Rp. Miliar), 2016-2020	43
Gambar 4.2.	Perkembangan PDRB per Kapita Kota Solok (Rp. Juta), 2016-2020	48
Gambar 4.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok (%), 2016-2020	52
Gambar 4.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (%), 2016-2020	54
Gambar 4.5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Menurut Pengeluaran (%), 2016-2020	56
Gambar 4.6.	Distribusi Komponen PDRB ADHK Kota Solok Menurut Pengeluaran (%), 2016-2020	57
Gambar 4.7.	Perkembangan Inflasi Kota Solok, Provinsi Sumbar dan Nasional (% y-o-y), 2016-2020	59
Gambar 4.8.	Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Barang dan Jasa TW-II (%), 2021	61
Gambar 4.9.	Perkembangan TPAK Kota Solok Tahun 2016 – 2020	63
Gambar 4.10.	Perkembangan TPAK, TPT, dan % penduduk bekerja terhadap angkatan kerja	64
Gambar 4.11.	Perkembangan TPT berdasarkan lulusan tahun 2017 - 2020	65
Gambar 4.12.	Distribusi Pencari Kerja Terdaftar Berdasarkan Kecamatan di Kota Solok tahun 2020	67
Gambar 4.13.	Rata-rata Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan, 2017-2020	68
Gambar 4.14.	Peta Sebaran Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kelurahan di Kota Solok Tahun 2021	71
Gambar 4.15.	Analisis Pengganda Output Sektor-Sektor Ekonomi Kota Solok	88
Gambar 4.16.	Analisis Pengganda Pendapatan Sektor-Sektor Ekonomi Kota Solok	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi khususnya dan pembangunan suatu daerah pada umumnya. Masalah-masalah yang melekat dalam pembangunan ekonomi seperti tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja, terbatasnya lapangan kerja, dan masih tingginya angka kemiskinan menjadi faktor penghambat untuk percepatan pembangunan ekonomi. Salah satu upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang berasal dari dalam dan luar daerah yang diyakini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kondisi ini sangat disadari oleh pemerintah daerah Kota Solok.

Setiap daerah pada dasarnya mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah harus mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Sehingga akan dipahami bahwa tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 4 menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Oleh karena itu, kekuatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan nasional sangat ditentukan oleh sejauh mana pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan yang merata bagi setiap lapisan masyarakat serta berkurangnya ketimpangan dalam masyarakat adalah tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

Dalam RPJMD Kota Solok 2021-2026, misi pembangunan ekonomi daerah tercantum pada ke 2 (dua yaitu *Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pada Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan Dan Didukung Oleh Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*. Untuk mewujudkan misi ini dibutuhkan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang mampu mengintegrasikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah di Kota Solok sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Disamping itu, dalam pembangunan ekonomi mendatang, Kota Solok akan menghadapi persaingan ekonomi yang semakin tinggi dan peningkatan dinamika sosial masyarakat, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid 19 yang berdampak tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Untuk menghadapi beberapa tantangan tersebut, upaya pembangunan ekonomi di segala bidang secara terintegrasi perlu disusun melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi terpadu. Pedoman tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan perekonomian

Kota Solok, atas dasar inilah Kajian Pembangunan Ekonomi Terpadu di Kota Solok sangat diperlukan agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang melandasi dilakukannya kajian ini, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Pengganti Permendagri Nomor 5 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya kajian Pembangunan Ekonomi Terpadu di Kota Solok adalah tersusunnya pedoman atau arah pola pembangunan ekonomi di Kota Solok dalam format keterpaduan lintas sektor yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Solok.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kajian ini adalah untuk memberi arah pembangunan ekonomi serta konsep, kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pembangunan ekonomi di Kota Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2021-2026 dan menyiapkan arah, strategi dan pola keterpaduan pembangunan ekonomi di Kota Solok.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya pedoman atau arah pola pembangunan ekonomi di Kota Solok dalam format keterpaduan lintas sektor.
2. Terbentuknya arah pembangunan ekonomi serta konsep, kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pembangunan ekonomi di Kota Solok.
3. Tersedianya arah, strategi dan pola keterpaduan pembangunan ekonomi di Kota Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1.5. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan meliputi wilayah administratif Kota Solok yang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan dan 13 (tiga belas) Kelurahan.

1.6. Ruang Lingkup

1) Lingkup Wilayah Studi

Kajian ini melingkupi seluruh wilayah Kota Solok dengan cakupan sebagai berikut:

1. Seluruh OPD di Kota Solok
2. Seluruh wilayah Kota Solok yang merupakan objek kajian

2) Lingkup Pekerjaan

Kajian ini melalui beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melakukan persiapan manajemen dan administrasi pengkajian.
2. Menyusun kebutuhan data/ informasi terkait.
3. Melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder.
4. Menganalisis dan membahas data dan informasi.

5. Penyusunan laporan pendahuluan.
6. Pembahasan Laporan pendahuluan oleh tim ahli dan tim teknis kajian.
7. Finalisasi Laporan Pendahuluan.
8. Pengumpulan data pendukung, baik data primer maupun sekunder.
9. Penyusunan laporan antara.
10. Pembahasan laporan antara oleh tim ahli dan tim teknis pengkajian.
11. Finalisasi laporan antara.
12. Penyusunan laporan akhir.
13. Pembahasan laporan akhir oleh tim ahli dan tim teknis pengkajian.
14. Finalisasi laporan akhir.
15. Menyusun ringkasan eksekutif.
16. Seminar hasil kajian.
17. Cetak dokumen publikasi.

3) Keluaran Pekerjaan

Keluaran (output) dari pekerjaan ini berupa 1 (satu) dokumen tentang analisis pembangunan ekonomi terpadu Kota Solok tahun 2021 – 2026 yang memuat konsep, kebijakan, persiapan arah, strategi, dan pola keterpaduan pembangunan ekonomi di Kota Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen ini diharapkan nanti dapat memberikan rekomendasi dan menjadi referensi bagi Walikota Solok dan pengambil kebijakan lainnya di Kota Solok, khususnya terkait kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2006). Menurut Todaro (2011), pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional. Proses tersebut melibatkan perubahan besar, yang mencakup perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pengertian di atas, suatu perekonomian dikatakan mengalami perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, proses perkembangan atau pembangunan ekonomi dikatakan terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan utama pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah semestinya mampu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengoreksi kebijakan yang kurang tepat. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional secara menyeluruh. Untuk itu ada dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan yaitu (Darwanto, 2002):

- 1) Mengenali ekonomi wilayah; Isu-isu utama dalam perkembangan ekonomi daerah yang perlu dikenali adalah antara lain adalah perkembangan dan mobilitas penduduk, lapangan usaha potensial dan

unggulan, kualitas lingkungan dan keterkaitan antar wilayah di daerah bersangkutan

- 2) Merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis; Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak dapat terlalu banyak memasuki aktivitas dalam proses kegiatan ekonomi masyarakat secara berlangsung.

Di sisi lain, para pelaku usaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat dengan berbagai inisiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan penerimaan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut di masa mendatang.

Adapun prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis diantaranya adalah:

- a. Menyediakan Informasi peluang investasi dan usaha secara terbuka kepada Pengusaha
- b. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan terkait perizinan dan pengembangan usaha

- c. Mendorong pengembangan usaha di daerah
- d. Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah
- e. Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi Daerah

Menurut Suparmoko, 2001; Pemerintah daerah harus mampu merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan dengan baik, karena dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha di daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di daerah, perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Mengeidentifikasi sektor-sektor/lapangan usaha/ kegiatan usaha mana yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masingnya.
- 2) Mengidentifikasi sektor-sektor/lapangan usaha/ kegiatan usaha mana yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
- 3) Mengidentifikasi sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang dimiliki, terutama sumberdaya manusianya dan yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
- 4) Menentukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
- 5) Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang akan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh (*Leadingg Sector*), sehingga perekonomian akan dapat berkembang

dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*).

2.2. Konsep Ekonomi Inklusif

Suatu proses pembangunan secara umum ditujukan untuk mencapai tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di berbagai negara pertumbuhan ekonomi menjadi syarat utama untuk mencapai penurunan kemiskinan. Akan tetapi pada kenyataannya perekonomian yang tinggi tidak begitu berperan bagi menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat bila tidak di ikuti dengan adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Indonesia dan negara-negara lain di dunia, masih menghadapi kondisi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antar individu maupun daerah. Fenomena kemiskinan dan ketidakadilan global ditunjukkan dengan adanya 20% populasi dunia yang mampu menikmati lebih dari 70% pendapatan dunia, atau dengan kata lain sebanyak 80% populasi dunia hanya mampu menikmati kurang dari 30% pendapatan dunia. Kemiskinan dan ketimpangan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Biasanya daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi akan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang tidak memiliki. Todaro (2003) berpendapat bahwa ketimpangan yang ekstrim akan menimbulkan berbagai dampak antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa pertumbuhan saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi biasanya hanya mementingkan pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) suatu negara tetapi kurang memerhatikan masalah penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan dan

pemerataan pendapatan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru menambah jumlah penduduk miskin dan memperlebar ketimpangan pendapatan antar individu. Menurut Eric Maskin (penerima penghargaan Nobel Ekonomi, 2007) mengukur hasil pembangunan hanya dari pertumbuhan ekonomi semata akan meniadakan terjadinya pemerataan dalam masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan.

Ketimpangan tidak hanya terkait pendapatan dan kekayaan namun juga berhubungan dengan ketimpangan kesempatan seperti akses pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin semua masyarakat menerima manfaat yang sama. Untuk memperoleh ukuran yang mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan masalah sosial, beberapa lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF) dan United Nation Development Programme (UNDP) merumuskan suatu set variabel dan formula untuk melakukan pengukuran pertumbuhan ekonomi alternative yang menekankan pada kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Ukuran ini disebut dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menurut ADB (2011), ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan harus inklusif yaitu:

- 1) Pertimbangan kesetaraan dan keadilan, pertumbuhan seharusnya terdistribusi dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat dan daerah.
- 2) Pertumbuhan dengan ketimpangan yang persisten dapat membahayakan kondisi sosial, seperti orang miskin dan pengangguran lebih rentan masuk dalam aktivitas kriminal, perempuan lebih rentan ke prostitusi, dan tenaga kerja anak yang tidak diharapkan.

- 3) Ketimpangan dalam hasil dan akses yang berkelanjutan dapat mengganggu stabilitas politik dan struktur sosial sehingga mengurangi potensi Pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi inklusif diawali dengan pembangunan ekonomi yang inklusif. Menurut Prasetyantoko, dkk (2012), pembangunan ekonomi inklusif adalah Pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakang dan perbedaan-perbedaannya. Hal ini senada dengan pendapat Ali dan Son (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Pertumbuhan didefinisikan sebagai inklusif jika meningkatkan fungsi kesempatan sosial, yang tergantung pada dua faktor yaitu: (i) peluang rata-rata yang tersedia bagi masyarakat, dan (ii) bagaimana peluang dibagi kepada masyarakat. Pertumbuhan inklusif diukur dengan menggunakan fungsi kesempatan sosial atau fungsi kesejahteraan sosial. Pertumbuhan inklusif diukur dengan dua pendekatan yaitu partial dan full. Pendekatan partial berdasarkan "opportunity curve", sedangkan pendekatan full berdasarkan indeks "opportunity curve".

Konsep pertumbuhan inklusif menurut ADB (2020) adalah pertumbuhan ekonomi dengan kesetaraan kesempatan, konsep ini dikembangkan oleh Ali dan Zhuang (2007) dan Zhuang (2010), dimana terdapat tiga dimensi kebijakan untuk menuju Pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan semua lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan. Tiga dimensi tersebut adalah:

- 1) Pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan akan menciptakan peluang ekonomi,

- 2) Social inclusion untuk memastikan setiap anggota masyarakat berkesempatan yang sama atas peluang ekonomi,
- 3) Social safety nets untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Selanjutnya McKinley (2010) dan ADB menyusun indeks komposit untuk mengukur pertumbuhan inklusif di 6 negara yaitu Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Filipina dan Uzbekistan dengan menggunakan data 1990-2006. Indeks inklusif ini menggunakan indikator (a) pertumbuhan, tenaga kerja produktif, infrastruktur ekonomi, (b) kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (termasuk kesetaraan gender), (c) kapabilitas manusia dan (d) perlindungan sosial. Indeks komposit ini didasarkan dengan metode skoring dan skema penimbang. Skor dibuat menjadi 3 capaian yaitu tidak memuaskan (<4), memuaskan (4-7), dan sangat memuaskan (8-10).

UNDP dan Ramos, dkk (2013), mengukur pertumbuhan inklusif terdiri dari komponen outcome dan proses, yang melibatkan partisipasi dan benefit-sharing. Pertumbuhan inklusif merupakan peningkatan kapasitas produksi yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan dan memastikan manfaatnya terdistribusikan. Ramos, dkk (2013) menyusun indeks inklusif untuk 43 negara berkembang dengan data tahun 1996-2006 berdasarkan tiga indikator yaitu: kemiskinan (headcount ratio at US\$ 2 a day PPP), ketimpangan (GINI), Employment to Population Ratio/EPR (rasio tenaga kerja terhadap populasi). Alasannya adalah pengembangan kerangka pertumbuhan inklusif dapat diukur dari bagaimana hasil pertumbuhan didistribusikan (kemiskinan dan ketimpangan) dan bagaimana pertumbuhan mengubah peluang untuk partisipasi ekonomi (pekerjaan).

Kemudian nilai indeks yang dihasilkan skor berada pada skala 0 sampai 1, semakin dekat nilai indeks dengan 0, semakin inklusif. Secara khusus, indeks akan

mendekati 0, semakin rendah tingkat kemiskinan dan indeks Gini sehingga indeks rendah mengindikasikan tingkat inklusivitas yang tinggi.

World Economic Forum (2017) menyusun Inclusive Growth and Development Index (IDI) untuk 109 negara dengan data 2016 dimana negara-negara tersebut dikelompokkan menjadi negara ekonomi maju, negara berpendapatan menengah ke atas, negara berpendapatan menengah ke bawah dan negara berpendapatan rendah berdasarkan PDB per kapita. IDI merupakan indeks komposit berdasarkan 7 pilar yaitu education and skills, basic services and infrastructure, corruption and rents, financial intermediation of real economy investment, asset building and entrepreneurship, employment and labor compensation, dan fiscal transfers. Nilai indeks inklusif merupakan hasil agregasi skor masing-masing pilar. Ketujuh pilar tersebut terdiri dari beberapa indikator. Data indikator tersebut dikonversi menjadi skala 1-7 (dari terburuk ke terbaik).

2.3. Konsep Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator pembangunan ekonomi adalah nilai statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Statistik tersebut diterbitkan secara periodik (bisa harian, bulanan, maupun tahunan) oleh pemerintah, lembaga-lembaga atau pun organisasi- organisasi swasta. Indikator pembangunan ekonomi tersebut dipublikasikan berdasarkan atas pengamatan terhadap industri-industri, wilayah/daerah, ataupun negara. Fungsi utama indikator pembangunan ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini, memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang, dan membuat perbandingan kinerja perekonomian suatu daerah dalam konteks antar waktu maupun antar daerah. Fungsi lain dari indikator pembangunan ekonomi adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator pembangunan ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar

barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melakukan pengukuran kinerja pembangunan melalui tiga pilar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yaitu: (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan kesempatan. Keberhasilan pencapaian masing-masing pilar pembangunan ekonomi tersebut diukur melalui beberapa indikator. Indikator untuk melihat kinerja pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara lain adalah pertumbuhan PDRB riil per kapita, kontribusi manufaktur terhadap PDRB, kesempatan kerja dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN. Indikator untuk melihat kinerja pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan antara lain adalah indeks Gini, rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota, dan persentase penduduk miskin. Kemudian, indikator untuk melihat perluasan akses dan kesempatan antara lain adalah Indeks Harapan Lama Sekolah, persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan, dan persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak.

Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No. 86 Tahun 2017 juga mengemukakan sejumlah indikator kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah indikatornya lebih banyak dari konsep yang dikemukakan oleh Bappenas. Semua indikator dibagi atas tiga kelompok yaitu : (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (2) Aspek Daya Saing, dan (3) Aspek Pelayanan Umum. Ada beberapa dari indikator tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh Bappenas.

Selanjutnya, terkait dengan upaya pembangunan secara global yang dikembangkan melalui program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dimana pelaksanaan

pembangunan harus memperhatikan dan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu;

- 1) Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
- 2) Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
- 3) Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
- 4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16

2.4. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada

seluruh lapisan masyarakat. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan suatu ukuran yang komprehensif dalam melihat dan mengukur tingkat inklusivitas dari pembangunan Indonesia saat ini dan ke depannya.

Menurut Ignacy Sach (2004), strategi pembangunan ekonomi inklusif beserta seluruh kebijakan turunannya harus memiliki paling tidak tiga komponen penting sebagai fondasi utama: yaitu:

- 1) Negara harus menjamin hak-hak politik, sosial, dan kewarganegaraan. Komponen ini sangat terkait erat dengan nilai fundamental demokrasi, yakni transparansi dan akuntabilitas, yang sangat diperlukan untuk bekerjanya proses pembangunan. Ketiga hak ini juga upaya pra-kondisi untuk tercapainya sebuah pembangunan yang inklusif.
- 2) Semua warga negara harus memiliki akses yang sama ke semua program kesejahteraan.
- 3) Semua populasi juga harus mendapatkan peluang-peluang yang sama terhadap akses pelayanan publik, seperti pendidikan, perlindungan/jaminan kesehatan dan perumahan.

Sedangkan dari sisi implementasi, ada empat pilar utama yang harus dikembangkan sebagai basis utama membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni penguatan infrastruktur ekonomi, penguatan sumber daya manusia, penguatan sistem keuangan yang inklusif, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

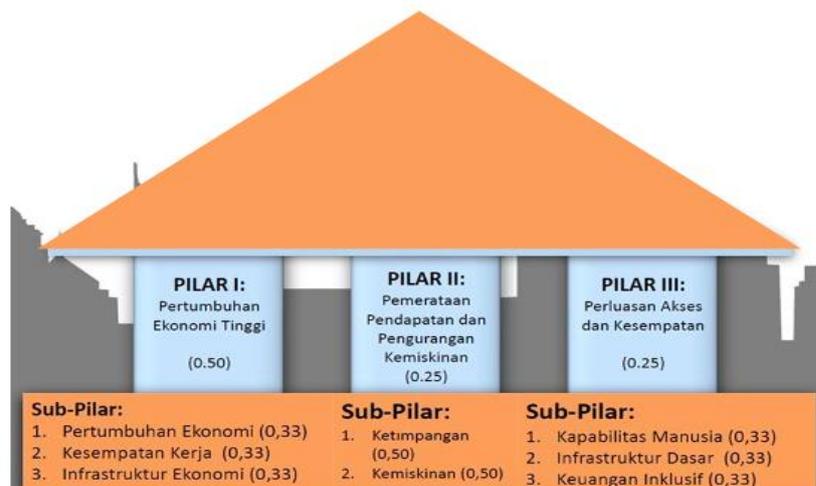
Dalam paradigma itu, perluasan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur harus lebih diutamakan dibandingkan dengan perbaikan infrastruktur itu sendiri. Untuk itu, infrastruktur yang mampu berperan sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif adalah jenis infrastruktur yang mampu memberikan akses secara merata terhadap masyarakat untuk mendapatkan pelayanan air

bersih, sanitasi, listrik, dan pendidikan. Akses terhadap semua itu akan mendorong masyarakat mengembangkan kehidupan sosial ekonomi mereka.

Disinilah pemerintah penting memiliki sebuah program yang komprehensif dan beberapa strategi bisa dilakukan antara lain: Pemerintah perlu menggunakan anggaran dengan baik, benar, efisien, dan efektif. Selain itu, di tengah kontraksi ekonomi global dan nasional, langkah reformasi serta tata kelola sektor pertanian yang terbukti tumbuh positif di saat pandemi ini harus segera dilakukan. Investasi langsung di sektor ini menjadi pilihan yang tak dapat dihindari karena terbukti mampu menjadi penopang ekonomi nasional saat krisis. Disamping itu, program-program hilirisasi yang dilaksanakan dengan serius dan sistematis bisa menjadi strategi yang tepat menuju kondisi perekonomian inklusif.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia telah dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas di tingkat nasional dan provinsi, indeks ini terbagi menjadi tiga pilar (pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan) dengan delapan sub-pilar utama serta 21 indikator. Adapun Komposisi pilar dan bobot dalam penyusunan angka indeks dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Pilar Pembangunan Ekonomi Inklusif



Sumber: Bappenas, 2021

Selanjutnya indicator untuk masing-masing pilar adalah sebagai berikut:

Pilar 1: Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomidan kesempatan kerja, dimana pada akhirnya akan dapat menciptakan Pembangunanana ekonomi yang inklusif

Sub-pilar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi:

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat, dengan indikator:

- 1) Pertumbuhan PDB/PDRB riil per kapita; angka tersebut didapatkan dari nilai PDB/PDRB atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu untuk menunjukkan nilai PDB/PDRB per satu orang penduduk secara riil (terkoreksi dengan angka inflasi) yang dinyatakan dalam persen.
- 2) Share (besaran) sektor manufaktur terhadap PDB/PDRB adalah persentase porsi sektor manufaktur terhadap keseluruhan PDB/PDRB. Industri Manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang terkait dengan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi; dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya; dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).
- 3) Rasio kredit perbankan terhadap PDB/PDRB dihitung dari total kredit terhadap total PDRB yang menunjukkan perbandingan antara total pemberian kredit terhadap produktivitas ekonomi. Rasio tersebut menilai

seberapa besar angka pinjaman (kredit) atas total produksi di sebuah perekonomian.

Sub-Pilar 1.2: Kesempatan Kerja

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi, Dengan indikator:

- 1) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menggambarkan peluang seorang individu yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.
- 2) Penduduk bekerja penuh adalah pekerja yang jumlah jam kerjanya dalam seminggu adalah lebih dari atau sama dengan 35 jam (≥ 35 jam). Pekerja penuh menunjukkan pekerjaan yang relatif lebih stabil serta memberikan paket tunjangan yang lebih baik bagi individu. Maka dengan jumlah jam kerja penuh, seseorang relatif lebih dapat menjamin penghidupannya untuk menjadi sejahtera. Penduduk dengan jam kerja ≥ 35 jam juga sering disebut dengan istilah pekerja formal.
- 3) Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, indikator ini secara umum menunjukkan kualitas pekerja yang relatif lebih baik. Pekerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memastikan jenis pekerjaan yang lebih profesional. Tingkat tenaga kerja yang berkualitas membuat tingkat inklusivitas ekonomi yang lebih tinggi, karena artinya akses dan kesempatan lebih bisa terserap oleh berbagai lapisan masyarakat.

Sub-Pilar 1.3: Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa besar pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator:

- 1) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN adalah persentase rumah tangga yang di rumahnya sudah tersedia jaringan atau dapat mengakses listrik/PLN terhadap total rumah tangga secara keseluruhan. Istilah lainnya disebut juga sebagai tingkat **elektrifikasi**. Tingkat elektrifikasi ini menggambarkan perluasan akses dan manfaat ekonomi karena pembangunan ekonomi dimulai dengan ketersediaan infrastruktur listrik. Aktivitas ekonomi berjalan cepat jika ketersediaan listrik sudah merata untuk semua masyarakat.
- 2) Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam adalah persentase penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler. Indikator ini menunjukkan kecakapan individu dalam menggunakan telepon seluler atau perangkat telekomunikasi elektronik. Penggunaan telepon seluler menjadi sarana pendukung pemerataan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.
- 3) Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang diukur dari total panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang terhadap luas wilayah. Total panjang jalan dengan kondisi baik mencerminkan keterjangkauan infrastruktur jalan dan aktivitas ekonomi yang lebih lancar. Artinya pertumbuhan ekonomi bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.

Pilar 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemsikinan

Pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, untuk itu ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Adapun indikator yang digunakan adalah:

Sub-Pilar 2.1: Ketimpangan

- 1) Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama rata, dan bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Rasio Gini atau juga disebut koefisien Gini didasarkan pada pengukuran luas kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari variabel pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio Gini yang tinggi menggambarkan ketimpangan ekonomi yang juga tinggi.
- 2) Sumbangan pendapatan perempuan merupakan sebuah indikator yang menggambarkan seberapa besar diskriminasi upah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Sumbangan pendapatan perempuan dihitung dari proporsi angkatan kerja perempuan dikalikan rasio upah perempuan terhadap rata-rata upah. Semakin tinggi nilai sumbangan pendapatan perempuan, semakin baik dan merata sebuah perekonomian.
- 3) Rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa terhadap kota menunjukkan perbandingan rata-rata pengeluaran rumah tangga pedesaan terhadap rumah tangga perkotaan. Rasio ini juga menggambarkan disparitas antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Angka rasio yang semakin tinggi menunjukkan tingkat pemerataan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan.

Sub-Pilar 2.2: Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Adapun indikator yang digunakan untuk sub pilar ini adalah:

- 1) Persentase penduduk miskin merupakan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya).
- 2) Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari adalah jumlah konsumsi protein dari komoditi pangan yang dikonsumsi penduduk di satu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan banyaknya kandungan gizi protein dari komoditi yang dimasak di rumah. Konsumsi protein yang tinggi secara rata-rata dapat menjadi ukuran perbaikan kesejahteraan; yang mengindikasikan penduduk miskin keluar dari kemiskinan.

Pilar 3 Perluasan akses dan Kesempatan Kerja

Pilar ini untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumberdaya manusia yang adil dan berkualitas

Sub-Pilar 3.1: Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, dengan indikatornya

- 1) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur- umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
- 2) Persentasi Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik program pelayanan kesehatan, dalam hal ini pemberian imunisasi. Balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap (PBD) adalah balita yang diimunisasi DPT sebanyak tiga kali, polio sebanyak tiga kali, BCG dan campak.
- 3) Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan menunjukkan besaran cakupan jaminan kesehatan pada masyarakat. Jaminan kesehatan bersifat sebagai jaring pengaman bagi masyarakat ketika mengalami kendala kesehatan. Adanya jaminan kesehatan merupakan salah satu indikasi masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik karena masyarakat terbantu dalam urusan finansial ketika menghadapi masalah kesehatan.

Sub-Pilar 3.2: Infrastruktur Dasar

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan. Indikatornya adalah:

- 1) Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
- 2) Persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air sendiri adalah perbandingan antara rumah tangga memiliki fasilitas buang air sendiri dengan rumah tangga seluruhnya. Ketersediaan fasilitas buang air dalam rumah tangga merupakan salah satu dari syarat sanitasi yang layak. Sanitasi yang layak merupakan salah satu indikator kelayakan hidup serta kesejahteraan.

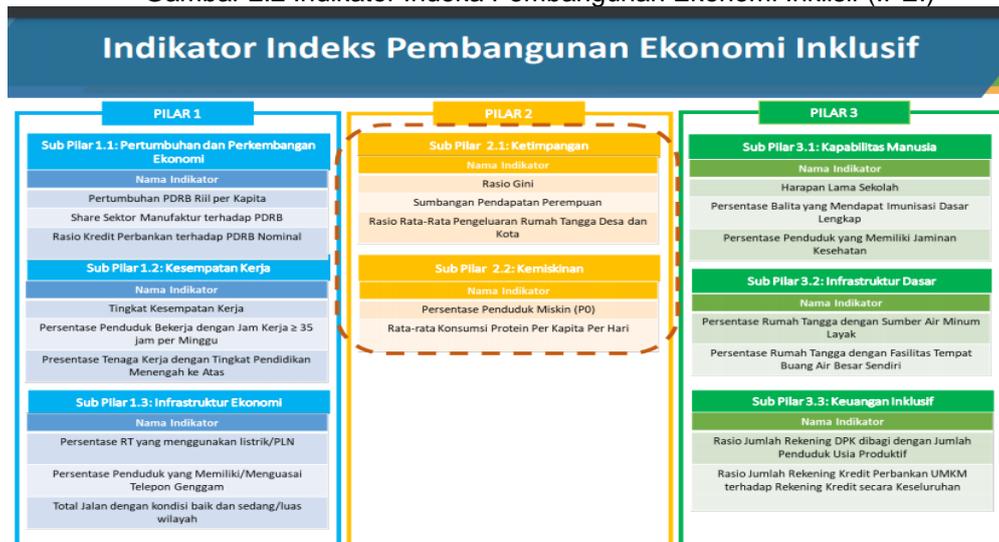
Sub-Pilar 3.3: Keuangan Inklusif

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas akan mampu mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Indikatornya adalah:

- 1) Rasio jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) terhadap penduduk usia produktif adalah pembagian jumlah total rekening DPK perbankan terhadap jumlah penduduk dewasa (usia di atas 15 tahun). Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan yang merupakan salah satu dimensi keuangan inklusif.
- 2) Rasio kredit perbankan UMKM adalah perbandingan antara jumlah rekening kredit perbankan yang disalurkan untuk pembiayaan kegiatan UMKM terhadap total rekening kredit perbankan seluruhnya. Semakin banyak kredit perbankan yang tersalurkan untuk kegiatan UMKM menunjukkan pembangunan ekonomi sudah mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi pengusaha skala kecil atau kelompok masyarakat di kelas pendapatan yang lebih kecil.

Secara ringkas, Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusi (IPEI) menurut Pilar dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Indikator Indeka Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)



Sumber: BAPPENAS, 2021

2.5. Teori Pembangunan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi merupakan unsur dan proses penting dalam pengembangan wilayah, dimana salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Adanya peningkatan perekonomian di suatu wilayah mengindikasikan adanya pembangunan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas ekonomi bukanlah satu-satunya aspek dalam pembangunan. Perekonomian di suatu wilayah dikatakan mengalami peningkatan atau perkembangan apabila jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar di bandingkan dengan tahun sebelumnya, dan untuk melihat peningkatan jumlah barang yang dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan yaitu dengan melakukan perhitungan pendapatan daerah berdasarkan atas harga konstan, dari nilai ini akan diperoleh pendapatan riil dari masyarakat daerah yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah sering dijadikan sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Banyak pemerintah daerah yang menjadikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai target utama dalam pembangunan wilayah. Mengingat begitu pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi suatu wilayah, banyak para ahli yang telah membahas tentang hal ini. Ada beberapa teori yang menghubungkan antara aspek ekonomi dengan aspek keruangan dan wilayah yang dikembangkan oleh para ahli, diantaranya adalah:

1) Pertumbuhan Berimbang dan Pertumbuhan Tidak Berimbang.

Menurut Gultom (2006), pertumbuhan berimbang merupakan upaya pembangunan di berbagai sektor, yaitu dengan melakukan investasi secara berimbang pada sejumlah sektor/industri yang saling menunjang sehingga pasar menjadi semakin besar dan memiliki daya saing. Dengan demikian, tidak hanya satu sektor saja yang menjadi tumpuan pembangunan akan tetapi ada beberapa sektor yang dijadikan tumpuan. Konsep pertumbuhan berimbang ini biasanya diterapkan dengan tujuan untuk menjaga agar proses pembangunan ekonomi masyarakat tidak menghadapi hambatan dalam memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar dan juga dalam memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksi dalam suatu wilayah.

Lewis dalam Gultom (2006) menyatakan bahwa pembangunan akan menghadapi banyak masalah jika hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antar berbagai sektor akan menimbulkan ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga pembangunan menjadi terhambat. Namun pada kenyataannya akan sangat sulit untuk melakukan investasi di segala

sektor karena adanya keterbatasan sumberdaya manusia, bahan mentah maupun modal untuk melakukan investasi secara serempak pada semua sektor/industri yang saling melengkapi. Oleh karena itu, investasi harus diprioritaskan pada sektor-sektor tertentu saja yang dinilai akan memberikan hasil terbaik agar investasi cepat berkembang dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan pada sektor lain, konsep ini kemudian lebih dikenal sebagai konsep pertumbuhan tidak berimbang.

Konsep Pertumbuhan tidak seimbang dikemukakan oleh Hirschman, Streeten dan beberapa ahli lain. Hirschman dan Streeten dalam Jhingan (2007) mengemukakan bahwa pembangunan tidak seimbang lebih tepat digunakan dalam mempercepat proses pembangunan dinegara-negara sedang berkembang. Menurut Hirschman, investasi pada industri atau sektor-sektor perekonomian yang strategis akan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut.

Hirschman juga menyatakan bahwa pembangunan memang harus berlangsung dalam cara tersebut, yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor utama, karena sector ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke sector pendukungnya, dari satu industri ke industri lainnya, dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, dan pada akhirnya peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah akan tercapai.

Namun demikian, konsep pertumbuhan tidak berimbang juga mempunyai keterbatasan dalam menggambarkan dan mengatasi permasalahan ekonomi di Negara berkembang. Namun para ahli menilai bahwa dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang lebih cocok

untuk menerapkan konsep pertumbuhan tidak berimbang, sedangkan konsep pertumbuhan berimbang lebih cocok untuk diterapkan di negara-negara maju (Jhingan, 2007)

2) Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) yang di kemukakan oleh John Glasson (1987), menyatakan bahwa ada keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah dengan kekuatan-kekuatan pendorong salah satu sector kepada sector yang lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sector yaitu sector kegiatan basis dan kegiatan bukan basis. Kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, dan menjualnya atau memasarkan produknya keluar daerah, sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis (*non basic activities*) adalah usaha ekonomi yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah ekonomi di daerah yang bersangkutan saja. Hal ini berarti bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis tidak menghasilkan produk untuk diekspor keluar daerahnya. Oleh karena itu, luas lingkup produksi mereka itu dan daerah pemasarannya masih bersifat lokal.

Menurut teori ini, meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis di dalam suatu daerah akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah yang bersangkutan, kemudian akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah itu dan akan mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi bukan basis (*effect multiplier*). Sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis akan berakibat berkurangnya

pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan selanjutnya akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-barang yang di produksi oleh kegiatan bukan basis.

Dengan demikian keterkaitan antara sector basis dan non basis juga akan menentukan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Untuk itu, penguatan kedua sector akan menjadi penguatan bagi perekonomian daerah. Sektor basis sering juga disebut dengan sektor unggulan

2.6. Peran Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Perkonomian

Upaya pembangunan perekonomian suatu wilayah sebaiknya diawali dengan melakukan analisis terhadap struktur dan tingkat kinerja kegiatan ekonomi atau perekonomian wilayah yang bersangkutan. Analisis ini berguna untuk mengetahui karakteristik dari struktur perekonomian yang ada dalam suatu wilayah serta mengetahui pertumbuhan atau kemampuan tumbuh kembang perekonomian wilayah dari waktu ke waktu, serta peran dari masing-masing sektor ekonomi pada suatu wilayah, sehingga dapat mengenali sektor unggulan yang dapat dikembangkan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pengembangan sektor unggulan dalam usaha pengembangan dan pembangunan ekonomi wilayah bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dana dan sumber daya serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah dengan lebih optimal dan dalam rangka optimasi dan efisiensi pembangunan perekonomian daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, dalam lingkup pengarahannya pembangunan diperlukan adanya suatu prioritas, dimana penentuan prioritas pembangunan ini diperlukan karena adanya keterbatasan dalam hal waktu, pendanaan, tenaga, dan sumber daya yang

tersedia. Salah satu cara untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah adalah dengan cara melakukan kajian dan analisis terhadap kegiatan perekonomian atau sektor ekonomi unggulan yang ada guna mengetahui kemampuan kinerja serta tumbuh kembang dari masing-masing sektor ekonomi. Kemampuan tumbuh kembang pada salah satu sektor ekonomi akan menjadi faktor penunjang dan penentu atau pendorong bagi pertumbuhan sektor yang lainnya. Oleh sebab itu, salah satu factor terpenting didalam pengembangan wilayah adalah pertumbuhan perekonomian wilayah dengan cara mengembangkan sektor-sektor unggulan yang ada.

Dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, pemahaman terhadap struktur ekonomi wilayah menjadi hal yang sangat penting untuk dapat menilai permasalahan dan potensi serta peluang yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah yang bersangkutan. Suatu gambaran yang komprehensif mengenai struktur ekonomi wilayah sangat bermanfaat dalam perencanaan wilayah (Sitohang, 1977).

Proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja, namun demikian, pertumbuhan ekonomi masih merupakan unsur penting dalam proses pembangunan wilayah di Indonesia. Wilayah yang dimaksudkan disini dapat berbentuk provinsi, kabupaten atau kota. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama pembangunan dalam rencana pembangunan wilayah disamping pembangunan sosial. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat ditingkatkan (Sjafrizal, 2008).

BAB III

METODOLOGI

3.1. Pendekatan Pelaksanaan

Pekerjaan penyusunan Kajian Pembangunan Ekonomi Terpadu Kota Solok menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data sekunder dan primer yang yang diperoleh dari dinas-dinas terkait dan studi lapangan. Sementara data kualitatif diperoleh dari diskusi dengan tim teknis Kota Solok. Langkah berikutnya menganalisis data kualitatif dan kuantitatif yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan konsep teori dan perkembangan data. Penggabungan kedua analisis ini, akan lebih memperluas wawasan permasalahan dan kondisi objektif makro ekonomi Kota Solok dalam beberapa tahun terakhir. Adapun rincian metode pendekatan sebagai berikut :

- 1) Desk study berupa kajian terhadap data-data sekunder yang dipublikasikan oleh lembaga terkait dan kemudian didiskusikan bersama dengan tim teknis.
- 2) Mengumpulkan berbagai informasi kualitatif dan kuantitatif, baik lisan maupun secara tertulis (terdokumentasikan) untuk melengkapi data sekunder yang sudah ada.
- 3) Mencermati kebijakan Pembangunan ekonomi pemerintah provinsi dan pusat serta arah & strategi pembangunan ekonomi Kota Solok didalam RPJMD Kota Solok 2021-2026
- 4) Mencermati kondisi capaian pembangunan ekonomi dan prospeknya pada masa yang akan datang.

Data yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Pembangunan embangunan Ekonomi Terpadu Kota Solok ini adalah data sekunder dan

dokumen perencanaan yang diperoleh dari berbagai instansi terkait yakni BPS, Bank Indonesia, Bappeda dan SKPD terkait serta situs internet.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk kajian dan penelaahan adalah dengan melakukan penelusuran data yang telah terdokumentasikan oleh lembaga terkait. Beberapa data dapat juga diperoleh melalui situs internet. Selain itu, data dan informasi dikumpulkan pula dengan berdiskusi dengan tim teknis pemerintah Kota Solok.

3.3. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah mengikuti tinjauan konsep-konsep dan formula perhitungan ekonomi dan statistik. Untuk mempermudah dan mempercepat serta mencapai keakuratan perhitungan maka digunakan bantuan software statistik dan excel.

3.4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpulkan maka dilakukan sortir data. Sortir data adalah kegiatan untuk memilah-milah data yang relevan dan data yang kurang relevan bahkan mungkin tidak bermanfaat dalam penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Terpadu Kota Solok namun terikut dalam proses pengumpulan data sekunder. Selanjutnya data yang telah terpilah dianalisis dan disajikan secara deskriptif dan obyektif.

Adapun alat analisis data yang diterapkan adalah:

1) Analisis Location Quotient (LQ)

Location Quotient (LQ) adalah suatu rasio perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/ industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara regional maupun nasional, dengan formula adalah sebagai berikut

$$LQ = \frac{V_1^R / V^R}{V_1 / V}$$

dimana :

- V_1^R = Nilai PDRB suatu sektor kabupaten/kota
- V^R = Nilai PDRB seluruh sektor kabupaten/kota
- V_1 = Nilai PDRB suatu sektor tingkat propinsi
- V = Nilai PDRB seluruh sektor tingkat propinsi.

Apabila nilai koefisien $LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol dari pada peran sektor secara provinsi/nasional. Sebaliknya, apabila $LQ < 1$. Nilai koefisien $LQ > 1$ memberikan indikasi bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor i tersebut.

2) Analisis *Multiplier Effect*

Glasson (1987); telah mengembangkan teori multiplier regional; dalam teori ini dikemukakan adanya hubungan saling berkaitan antara sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah serta kekuatan-kekuatan pendorong salah satu sektor ke sektor yang lainnya secara langsung maupun tidak langsung, teori ini juga dikenal dengan teori basis ekonomi (*economic base theory*).

Menurut teori ini meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis di dalam suatu daerah, akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah itu dan akan mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi bukan basis (*effect multiplier*). Sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis, akan berakibat berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan selanjutnya akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh kegiatan bukan basis.

Dampak pengganda suatu sektor dirumuskan sebagai berikut:

$$Ei = \left(\frac{Esi}{Ebi} \right)$$

Dimana r merupakan efek pengganda (multiplier effect), E_{si} adalah aktivitas sektor non basis, dan E_{bi} merupakan aktivitas sektor basis. Selanjutnya aktivitas sektor basis dirumuskan sebagai berikut :

$$Esi = EiR - \left(\frac{Ein}{EN} \right) ER$$

Sedangkan untuk menghitung aktivitas non basis digunakan rumus sebagai berikut :

$$**Esi = EiR - Ebi**$$

Dimana :

EiR : Produksi sektor i di daerah yang diselidiki

ER : Produksi seluruhnya (Total Produksi) di daerah yang diselidiki

Ein : Produksi sektor i di seluruh daerah yang lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya

EiR : Produksi seluruhnya (Total Produksi) di seluruh daerah yang Lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya

3.5. Analisis Input – Output

a) Definisi Input Output

Analisis Input – Output adalah suatu analisis atas perekonomian wilayah secara comprehensive karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di wilayah secara keseluruhan. Dengan demikian apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sektor tertentu, dampaknya terhadap sektor lain dapat dilihat. Selain itu analisis ini juga terkait dengan tingkat kemakmuran masyarakat

diwilayah tersebut melalui input primer (nilai tambah). Artinya akibat perubahan tingkat produksi sektor-sektor tersebut, dapat dilihat seberapa besar kemakmuran masyarakat bertambah/berkurang. Setiap produksi pasti membutuhkan Input agar produksi itu dapat dihasilkan. Hasil produksi dapat langsung di konsumsi atau sebagai input untuk menghasilkan produk lain atau input untuk produk yang sama pada putaran berikutnya, misalnya bibit. Input dapat berupa Output dari sector lain (termasuk dari sektor sendiri tetapi dari putaran sebelumnya) yang sering disebut Input antara berupa bahan baku dan Input primer berupa tenaga kerja, keahlian, peralatan, dan modal. Keikutsertaan faktor-faktor produksi akan mendapat imbalan yang menjadi pendapatan masyarakat sesuai dengan peran/keterlibatannya.

Tabel 3.1. Matrix dasar Input Output

Alokasi Output				Permintaan Antara		Permintaan Akhir	Total Output
				Sektor Produksi			
Struktur Input				A.....Z		A.....Z	
				1.....n	1.....n		
Input Antara	Sektor Produksi	A	1	$X_{11}^{AA}..X_{1n}^{AZ}$	$X_{11}^{AA}..X_{1n}^{AZ}$	F_1	Y_1
	
	
	
	
		Z	m	$X_{m1}^{ZA}..X_{mn}^{ZZ}$	$X_{m1}^{ZA}..X_{mn}^{ZZ}$	F_n	Y_n
Nilai Tambah Bruto (Input Primer)				$V_1.....V_n$			
Total Input				$Y_1.....Y_n$			

Secara teknis, tabel Input – Output (I-O) merupakan sebuah matriks yang memperlihatkan keterkaitan transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi (lihat table 3.1). Baris dari matriks menunjukkan bagaimana output suatu sektor ekonomi dialokasikan ke sektor-sektor lainnya untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, sedangkan kolom dari matriks menunjukan pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor dalam

suatu proses produksinya. Besarnya ketergantungan suatu sektor ditentukan oleh jumlah input yang digunakan dalam proses produksinya maupun besarnya output yang dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir sektor lain.

Badan Pusat Statistik (2000a; 2000b) mengatakan bahwa analisis input output dapat dimanfaatkan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Dapat memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap output, nilai tambah, impor, permintaan, pajak dan kebutuhan tenaga kerja diberbagai sektor produksi.
2. Dapat mengidentifikasi sektor yang pengaruhnya paling dominan atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor yang peka terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Dapat menyusun memperkirakan indikator ekonomi makro.
4. Dapat melihat komposisi penyediaan dan penggunaan barang dan jasa, serta kaitannya terhadap kebutuhan impor dan kemungkinan substitusinya.
5. Dapat digunakan untuk menganalisis perubahan harga, yaitu dengan melihat pengaruh langsung dan tidak langsung dari perubahan harga input terhadap output.

a) **Metode Penyusunan Tabel Input Output**

Berdasarkan ketersediaan data, penyusunan Tabel I-O dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung melalui survei atau penelitian lapangan, sedangkan pendekatan tidak langsung atau metode non survei diperoleh dari penyesuaian terhadap Tabel I-O lain yang sudah ada. Analisis input output Kota Solok dalam rangka mengkaji

pembangunan ekonomi terpadu dilakukan dengan menggunakan pendekatan tidak langsung atau metode non survei.

Secara spesifik, metode non survei dalam penyusunan Tabel I-O dilakukan melalui *updating* (pemutakhiran), dimana dalam pengisian sel-sel Tabel I-O tidak menggunakan metode survei. Hal ini terutama dilakukan untuk menduga atau menaksir matriks kuadran I atau matriks transaksi antar yang datanya tidak selalu tersedia. Oleh karena itu tujuan utama metode non-survei adalah menaksirkan dan memperbaiki koefisien input antara atau koefisien teknis (A) pada Tabel I-O. Sedangkan pembentukan matriks di kuadran II (permintaan akhir) perolehan datanya relatif lebih mudah, misalnya data pendapatan nasional, data ekspor dan impor yang setiap tahunnya tersedia. *Updating* (pemutakhiran) table IO dilakukan menggunakan metode RAS.

b) Langkah-langkah Penghitungan Tabel Input-Output

Langkah pertama yang dilakukan dalam penyusunan Tabel I-O Kota Solok adalah penyusunan klasifikasi sektor, dimana seluruh kegiatan ekonomi di Kota Solok dikelompokkan ke dalam sektor-sektor ekonomi. Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan klasifikasi ini adalah didasarkan pada satuan komoditif atau kegiatan ekonomi yang mempunyai kesamaan dalam produk yang dihasilkan atau kesamaan dalam kegiatan ekonomi.

Langkah kedua adalah pengumpulan data/ informasi dari berbagai sumber yang cukup relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam memperkirakan output, nilai tambah atau setidaknya harus cukup memadai untuk menyusun struktur input dari masing-masing sektor berdasarkan klasifikasi yang disusun. Dalam hal ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diterbitkan oleh BPS Kota Solok.

Langkah ketiga adalah melakukan penghitungan/ perkiraan output (kontrol total), perkiraan nilai tambah bruto sektoral, penyusunan struktur (koefisien) input untuk masing-masing sektor serta penyusunan struktur input untuk masing-masing komponen permintaan akhir. Hasil yang dicapai pada langkah ketiga akan menjadi bahan dasar (utama) dalam menyusun Tabel I-O Kota Solok.

Langkah keempat adalah pengolahan dan penyusunan tabel transaksi antara sektor ekonomi sehingga terbentuk secara lengkap matriks Input-Output. Penyusunan tabel transaksi dilakukan dengan metode RAS. Tabel transaksi yang dirujuk adalah tabel transaksi I-O Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Langkah terakhir adalah proses rekonsiliasi antara sektor baris dan kolom. Proses ini dilakukan berulang-ulang disertai pengecekan terhadap kelayakan dan konsistensi data yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan tabel-tabel analisis.

3.6. Metode RAS

Metode RAS adalah metode penaksiran matriks teknologi daerah tertentu berdasarkan matriks teknologi di daerah lain. Langkah-langkah metode RAS adalah seperti berikut:

1. Tentukan matriks teknologi daerah asal

$$A(0) = \begin{bmatrix} a_{11}(0) & a_{12}(0) & a_{13}(0) \\ a_{21}(0) & a_{22}(0) & a_{23}(0) \\ a_{31}(0) & a_{32}(0) & a_{33}(0) \end{bmatrix}$$

2. Tentukan jumlah output sektoral pada daerah yang dicari, notasikan dengan $X(1)$. Kemudian tentukan kolom transaksi input output pada daerah yang dicari dinotasikan $V(1)$, yang menyatakan jumlah output seluruh sektor yang digunakan sebagai input untuk memproduksi sektor 1. Kemudian tentukan juga baris transaksi input output pada daerah yang

dicari dinotasikan $U(1)$, yang menyatakan Jumlah output sektor 1 yang digunakan sebagai input produksi oleh seluruh sektor. Nilai $X(1)$, $V(1)$, dan $U(1)$ diperoleh dari data sekunder. Dalam penelitian ini nilai $U(1)$ dan $V(1)$ didasarkan pada Z dari tabel input output asal, kemudian dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah yang ditaksir.

3. Tentukan kriteria kekonvergenan yang diinginkan, misalnya $\epsilon \leq 0.00001$.
4. Tentukan $U^1 = [A(0)\hat{X}(1)]i$

Dimana

$$X(1) = \begin{bmatrix} X_1(1) & 0 & 0 \\ 0 & X_2(1) & 0 \\ 0 & 0 & X_3(1) \end{bmatrix}, i = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Bandingkan nilai U^1 dengan $U(1)$, yang diharapkan adalah $|U^1 - U(1)| \leq \epsilon$. Jika kondisi tersebut tidak terjadi maka harus dilakukan penyesuaian melalui

$$R(1) = [\hat{U}(1)][\hat{U}^1]^{-1}$$

5. Estimasi matriks teknologi $A_1 = R_1 A(0)$
6. Tentukan $V^1 = i'[A^1 X(1)]$

Bandingkan nilai V^1 dengan $V(1)$, yang diharapkan adalah $|V^1 - V(1)| \leq \epsilon$. Jika kondisi tersebut tidak terjadi maka harus dilakukan penyesuaian melalui

$$S(1) = [\hat{V}(1)][\hat{V}^1]^{-1}$$

7. Estimasi matriks teknologi yaitu $A_2 = A_1 S_1 = R_1 A(0) S_1$
8. Lakukan iterasi sampai kriteria konvergen ditemukan.

BAB 4
KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI
KOTA SOLOK

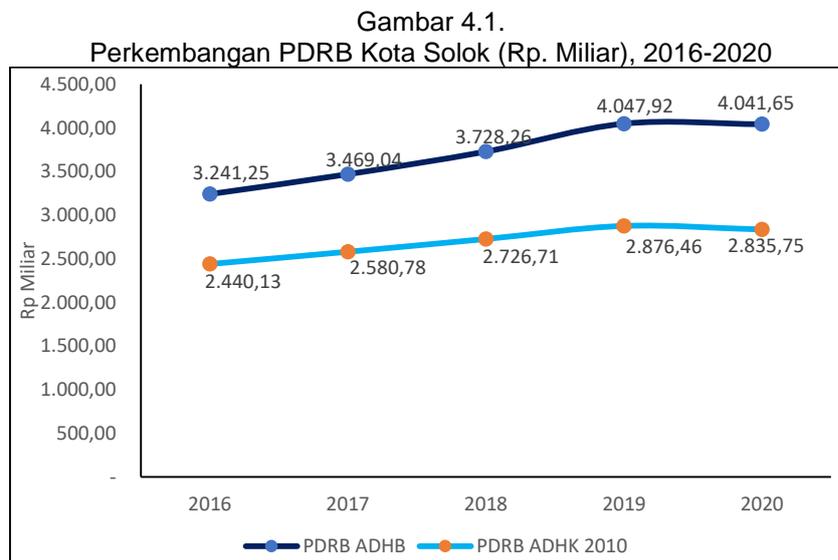
Pembangunan ekonomi terpadu (PET) merupakan proses pembangunan yang mengintegrasikan berbagai komponen kinerja pembangunan ekonomi. Diantara berbagai kinerja pembangunan yang menjadi acuan utama adalah PDRB dan PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kesempatan kerja, kemiskinan dan kesenjangan, pembangunan ekonomi inklusif, potensi ekonomi daerah, dan keterkaitan antar sektor ekonomi. Pemahaman yang baik terhadap acuan utama kinerja pembangunan ekonomi yang sedang dan telah berlangsung dapat menjadi informasi dalam merumuskan strategi dan rencana aksi pembangunan ekonomi terpadu Kota Solok secara sistematis dan tepat sasaran. Pada akhirnya pembangunan ekonomi terpadu diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan antar golongan pendapatan dalam masyarakat Kota Solok.

4.1. PDRB dan PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi Kota Solok. Keberhasilan pembangunan ekonomi terpadu akan tercermin pada keberhasilan dalam peningkatan PDRB. Oleh karena itu, analisis kinerja PDRB Kota Solok meliputi: (1) perkembangannya antar waktu secara agregat nominal dan riil termasuk PDRB per kapita, (2) pertumbuhan per tahun dalam persentase, dan (3) perubahan struktur PDRB antar waktu. Analisis berbagai aspek PDRB ini akan memberikan gambaran sejauhmana pembangunan sumberdaya ekonomi Kota Solok dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan partisipasi seluruh *stakeholders* yang ada di Kota Solok.

4.1.1. Perkembangan PDRB Kota Solok

Pembangunan ekonomi terpadu ditujukan untuk meningkatkan ukuran ekonomi (*economic size*) Kota Solok yang tercermin pada besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB merupakan indikator besaran *output* dari aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Analisis perkembangan PDRB secara langsung memperlihatkan besaran aktivitas output Kota Solok. Pembangunan ekonomi Kota Solok yang semakin terpadu diharapkan dapat meningkatkan PDRB. Peningkatan PDRB ini mencerminkan peningkatan kemampuan dan aktivitas ekonomi di Kota Solok.



Sumber: <https://solokkota.bps.go.id/> diakses 2021

Pandemi COVID-19 telah mengkontraksi PDRB Kota Solok baik secara nominal maupun riil. PDRB Kota Solok sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2020 selalu mengalami kenaikan setiap tahun dalam periode 2016-2020. PDRB nominal Kota Solok pada tahun 2016 telah mencapai Rp. 3,24 triliun dan PDRB riil sebesar Rp. 2,44 triliun. PDRB nominal dan riil mengalami peningkatan pada 2019 berturut-turut sebesar Rp. 4,05 triliun dan Rp. 2,88 triliun. Peningkatan PDRB nominal dan riil mengindikasikan telah terjadi peningkatan aktivitas pembangunan ekonomi di Kota Solok sebelum pandemi COVID-19. Capaian PDRB tahun 2019

terkontraksi oleh kehadiran COVID-19 yang ditunjukkan oleh penurunan PDRB nominal menjadi Rp. 4,04 triliun dan PDRB riil menjadi Rp. 2,84 triliun pada tahun 2020. Kehadiran COVID-19 dimulai pada kuartal pertama 2020 telah menurunkan aktivitas ekonomi Kota Solok dan berdampak pada penurunan output yang relatif tajam. Dampak COVID-19 pada tahun 2021 masih terlihat pada belum optimalnya peningkatan output perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengembalikan output ekonomi paling tidak sama dengan kondisi sebelum COVID-19 memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi terpadu melibatkan seluruh pelaku ekonomi di Kota Solok dan juga perantau yang memiliki kepedulian dengan kemajuan pembangunan ekonomi Kota Solok.

Dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi terpadu maka penting memahami struktur perekonomian. Struktur perekonomian memberikan informasi sektor-sektor yang menjadi tumpuan dalam menggerakkan output dan aktivitas ekonomi. Sektor yang memiliki output dominan menjadi kunci dalam output agregat. Jika dilihat struktur PDRB Kota Solok selama periode 2016-2020, sektor perdagangan dan reparasi, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi memiliki dominasi yang besar dalam perekonomian Kota Solok. Jika ketiga sektor ini mengalami peningkatan maka output agregat Kota Solok dapat dipastikan juga mengalami peningkatan dan berdampak pada sektor-sektor lainnya.

PDRB berlaku sektor perdagangan dan reparasi meningkat dari Rp. 832,43 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 1,02 triliun pada tahun 2020. Nilai PDRB berlaku sektor transportasi dan pergudangan meningkat dari Rp. 504,40 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 592,88 miliar pada tahun 2020. Selanjutnya, nilai PDRB berlaku sektor konstruksi meningkat dari Rp. 436,54 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 552,59 miliar pada tahun 2020. Tidak hanya nilai berlaku mengalami peningkatan, nilai PDRB riil ketiga sektor ini juga mengalami kenaikan dimana PDRB riil sektor perdagangan dan reparasi meningkat dari Rp. 611,88 miliar pada

tahun 2016 menjadi Rp. 723,50 miliar pada tahun 2020. Nilai PDRB riil sektor transportasi dan pergudangan meningkat dari Rp. 393,69 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 473,82 miliar pada tahun 2020. Sementara itu, nilai PDRB riil sektor konstruksi meningkat dari Rp. 299,54 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 351,87 miliar pada tahun 2020. Sayangnya, nilai PDRB ketiga sektor pada tahun 2020 ini lebih rendah dari tahun 2019 akibat COVID-19.

Tabel 4.1.
PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha PDRB	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	195,57	201,49	209,20	220,55	222,77	140,49	143,45	144,87	148,25	150,45
B. Pertambangan, Penggalian	23,97	24,79	25,61	25,29	24,91	16,46	16,81	17,16	16,80	16,44
C. Industri Pengolahan	170,43	172,79	177,15	165,95	167,23	142,85	144,32	147,18	140,22	136,93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,19	2,31	2,45	2,71	2,56	1,38	1,44	1,50	1,54	1,44
E. Pengadaan Air, Daur Ulang	6,08	6,33	6,60	7,14	7,39	4,89	5,07	5,28	5,52	5,70
F. Konstruksi	436,54	471,56	508,90	552,63	552,59	299,54	320,11	340,38	362,27	351,87
G. Perdagangan, Reparasi	832,43	881,96	954,58	1,032,74	1,019,89	611,88	646,19	685,58	725,16	723,50
H. Transportasi, Pergudangan	504,40	547,47	586,29	641,68	592,88	393,69	422,71	450,17	483,20	437,82
I. Akomodasi, Makan Minum	72,97	79,12	87,46	97,26	88,08	48,15	51,65	55,85	60,07	53,51
J. Informasi, Komunikasi	186,10	205,91	230,39	261,78	282,24	184,37	200,98	217,94	236,36	256,24
K. Keuangan, Asuransi	144,22	149,49	155,58	166,07	170,41	107,58	110,29	111,91	114,76	116,13
L. Real Estat	88,58	93,56	100,29	108,93	109,94	62,58	65,54	68,67	72,45	72,56
M. Jasa Perusahaan	0,56	0,60	0,64	0,71	0,70	0,40	0,42	0,44	0,47	0,45
O. Pemerintahan, Jaminan Sosial	268,01	292,99	313,92	346,74	369,14	205,77	214,40	226,47	236,93	235,63
P. Jasa Pendidikan	169,99	188,33	203,75	232,03	247,59	117,42	127,95	136,48	147,64	156,63
Q. Jasa Kesehatan, Keg Sosial	46,13	49,89	54,51	60,69	66,87	35,52	37,98	40,84	42,91	46,13
R. Jasa Lainnya	93,07	100,45	110,94	125,00	116,47	67,16	71,47	75,98	81,93	74,35
PDRB	3,241,25	3,469,04	3,728,26	4,047,92	4,041,65	2,440,13	2,580,78	2,726,71	2,876,46	2,835,75

Sumber: <https://solokkota.bps.go.id/> diakses 2021

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada analisis sebelumnya bahwa sektor perdagangan dan reparasi, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi masih dominan dalam perekonomian Kota Solok, Kondisi ini mencerminkan perubahan struktur ekonomi Kota Solok tidak mengalami perubahan signifikan selama periode 2016-2020. Dominasi sektor perdagangan dan reparasi dalam

perekonomian Kota Solok berkisar antara 25%-26% per tahun. Selanjutnya, dominasi sektor transportasi dan pergudangan berkisar antara 15%-16% per tahun, dan dominasi sektor konstruksi berkisar antara 12%-14% per tahun dalam PDRB Kota Solok. Besarnya kontribusi ketiga sektor maka sudah seyogyanyalah pembangunan ekonomi terpadu Kota Solok bertumpu pada pembangunan ketiga sektor tersebut yang didukung oleh pengoptimalan pemberdayaan sektor-sektor alternatif yang berpotensi mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Solok dimasa mendatang.

Tabel 4.2.
Distribusi PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (%), 2016-2020

Lapangan Usaha PDRB	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6,03	5,81	5,61	5,45	5,51	5,76	5,56	5,31	5,15	5,31
B. Pertambangan, Penggalian	0,74	0,71	0,69	0,62	0,62	0,67	0,65	0,63	0,58	0,58
C. Industri Pengolahan	5,26	4,98	4,75	4,10	4,14	5,85	5,59	5,40	4,87	4,83
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
E. Pengadaan Air, Daur Ulang	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20
F. Konstruksi	13,47	13,59	13,65	13,65	13,67	12,28	12,40	12,48	12,59	12,41
G. Perdagangan, Reparasi	25,68	25,42	25,60	25,51	25,23	25,08	25,04	25,14	25,21	25,51
H. Transportasi, Pergudangan	15,56	15,78	15,73	15,85	14,67	16,13	16,38	16,51	16,80	15,44
I. Akomodasi, Makanan dan Minuman	2,25	2,28	2,35	2,40	2,18	1,97	2,00	2,05	2,09	1,89
J. Informasi, Komunikasi	5,74	5,94	6,18	6,47	6,98	7,56	7,79	7,99	8,22	9,04
K. Keuangan, Asuransi	4,45	4,31	4,17	4,10	4,22	4,41	4,27	4,10	3,99	4,10
L. Real Estat	2,73	2,70	2,69	2,69	2,72	2,56	2,54	2,52	2,52	2,56
M. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O. Pemerintahan, Jaminan Sosial	8,27	8,45	8,42	8,57	9,13	8,43	8,31	8,31	8,24	8,31
P. Jasa Pendidikan	5,24	5,43	5,46	5,73	6,13	4,81	4,96	5,01	5,13	5,52
Q. Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial	1,42	1,44	1,46	1,50	1,65	1,46	1,47	1,50	1,49	1,63
R. Jasa Lainnya	2,87	2,90	2,98	3,09	2,88	2,75	2,77	2,79	2,85	2,62
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: <https://solokkota.bps.go.id/> diakses 2021

Walaupun sektor perdagangan dan reparasi, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi mendominasi perekonomian Kota Solok, sektor tradisional pertanian belum sepenuhnya dapat ditinggalkan. Kontribusi sektor

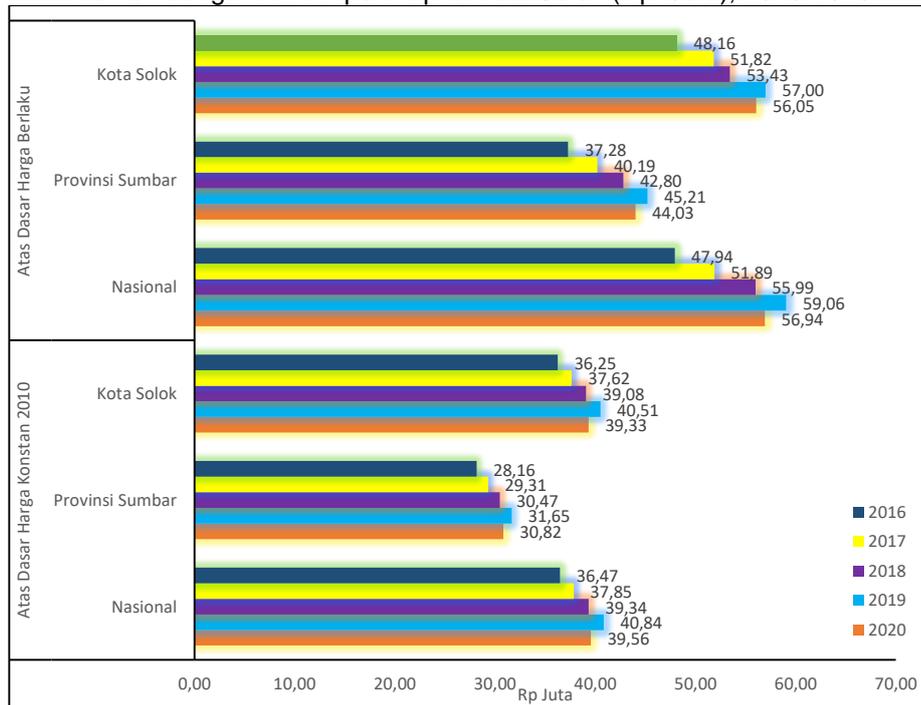
pertanian dalam struktur perekonomian Kota Solok cenderung stabil dan berkisar 5%-6% selama periode 2016-2020. Fakta ini mengindikasikan bahwa strategi pembangunan ekonomi terpadu di Kota Solok tidak hanya mengutamakan sektor dominan seperti sektor perdagangan dan reparasi, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi tetapi juga sektor pertanian yang tetap menjadi basis pembangunan ekonomi Kota Solok.

4.1.2. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Solok

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi terpadu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (*the measurement of well-being*) dan/atau tingkat standar hidup (*the level of standard of living*) masyarakat Kota Solok. Pada tingkat makro, perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Solok dapat ditelusuri dari PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita mengindikasikan tingkat kesejahteraan atau standar kehidupan masyarakat semakin meningkat.

PDRB per kapita Kota Solok baik nominal maupun riil mengalami kenaikan pada rentang waktu 2016-2019. Pada tahun 2016 PDRB nominal per kapita sebesar Rp. 48,16 juta meningkat menjadi Rp. 57 juta pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2016 PDRB riil per kapita sebesar Rp. 36,25 meningkat menjadi Rp. 40,51 juta pada tahun 2019. PDRB nominal perkapita rata-rata sebesar Rp. 54,58 juta per tahun dan PDRB riil per kapita sebesar Rp. 39,13 juta per tahun. PDRB per kapita Kota Solok baik nominal maupun riil telah berada diatas PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat tetapi masih dibawah PDRB per kapita nasional.

Gambar 4.2.
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Solok (Rp. Juta), 2016-2020



Sumber: <https://solokkota.bps.go.id/> akses 2021

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah berpengaruh pada perkembangan PDRB per kapita Kota Solok. PDRB nominal per kapita pada tahun 2020 sebesar Rp. 56,05 juta menurun dari Rp. 57 juta pada tahun 2019. Pada saat yang sama, PDRB riil per kapita menurun dari Rp. 40,51 pada tahun 2019 menjadi Rp. 39,33 juta pada tahun 2020. Kehadiran pandemi COVID-19 telah menurunkan tingkat kesejahteraan dan standar hidup penduduk Kota Solok secara keseluruhan. Penurunan ini disebabkan berbagai sektor yang menjadi tumpuan ekonomi Kota Solok mengalami kontraksi. Oleh karena itu, strategi dan pembangunan ekonomi terpadu diharapkan dapat mengembalikan tingkat kesejahteraan dan standar hidup masyarakat Kota Solok. Strategi yang dirinci dalam rencana aksi pembangunan ekonomi terpadu membutuhkan dukungan investasi relatif besar dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan. Pada rencana aksi pembangunan ekonomi terpadu seluruh *stakeholders* berpartisipasi dengan satu tujuan yakni meningkatkan gairah aktivitas ekonomi riil

masyarakat Kota Solok. Pembangunan ekonomi terpadu merupakan wujud dari pembangunan inklusif yang *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-job* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

4.1.3. Perbandingan PDRB per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, pembangunan ekonomi terpadu bertujuan untuk meningkatkan posisi kesejahteraan ekonomi (*the measurement of well-being*) dan/atau tingkat standar hidup (*the level of standard of living*) masyarakat Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat. Karena secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara dapat dicerminkan pada PDRB per kapita maka analisis perbandingan PDRB per kapita Kota Solok dengan PDRB per kapita kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat menjadi penting untuk diperhatikan dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi terpadu. Lebih lanjut, analisis perbandingan PDRB per kapita antar kabupaten/kota juga diperlukan untuk menyusun rencana aksi pembangunan ekonomi terpadu Kota Solok sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan tingkat kesejahteraan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.3.
PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Juta Rupiah), 2016-2020

Wilayah	PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribuan Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Mentawai	42,83	46,10	47,06	50,44	49,46	29,99	30,92	31,82	32,73	31,59
Pesisir Selatan	24,84	27,38	28,32	30,25	29,96	18,14	18,98	19,84	20,64	20,28
Kab,Solok	30,18	32,49	34,10	36,36	35,96	23,24	24,32	25,41	26,53	26,07
Sijunjung	32,87	34,67	36,31	38,46	37,87	25,76	26,67	27,57	28,47	27,74
Tanah Datar	31,05	33,53	35,13	37,58	37,34	24,17	25,34	26,55	27,81	27,45
Padang Pariaman	42,91	46,67	49,45	51,14	42,95	28,63	30,05	31,51	32,08	28,58
Agam	34,72	37,62	39,24	41,80	41,19	26,14	27,36	28,58	29,74	29,13
Lima Puluh Kota	34,03	36,65	38,27	40,79	40,24	25,80	26,92	28,07	29,24	28,66

Wilayah	PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Pasaman	26,89	29,04	29,87	31,66	31,32	19,59	20,36	21,16	21,96	21,57
Solok Selatan	28,26	30,11	30,97	32,57	31,81	21,11	21,82	22,52	23,25	22,60
Dharmasraya	36,80	39,42	40,14	41,78	40,41	28,30	29,07	29,82	30,54	29,41
Pasaman Barat	30,55	32,92	33,52	34,69	33,75	23,54	24,30	25,08	25,72	24,93
Padang	53,98	58,11	61,24	65,65	64,67	40,82	42,81	44,81	46,76	45,35
Kota Solok	48,16	51,82	53,43	57,00	56,05	36,25	37,62	39,08	40,51	39,33
Sawahlunto	48,34	52,34	55,00	58,85	58,02	39,17	41,00	42,90	44,73	43,81
Padang Panjang	53,64	57,76	60,35	64,72	63,82	42,27	44,12	46,13	48,06	46,74
Bukittinggi	54,39	58,78	62,21	66,49	65,00	41,45	43,25	45,13	47,04	45,55
Payakumbuh	40,08	43,68	45,88	50,34	49,63	29,02	30,33	31,70	33,11	32,10
Pariaman	47,11	50,64	52,68	56,56	55,86	35,74	37,34	38,93	40,59	39,65
Sumatera Barat	37,28	40,19	42,80	45,21	44,03	28,16	29,31	30,47	31,65	30,82
Indonesia	47,94	51,89	55,99	59,06	56,94	36,47	37,85	39,34	40,84	39,56

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/> diakses 2021

Jika dilihat perkembangan dan posisi PDRB per kapita Kota Solok diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, selama rentang waktu 2016-2019 menunjukkan kenaikan. PDRB nominal per kapita Kota Solok pada tahun 2019 mencapai Rp.57 juta dan PDRB riil per kapita sebesar Rp. 40,51 juta. PDRB Kota Solok lebih tinggi dari PDRB nominal perkapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 45,21 juta dan PDRB riil per kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 31,65 juta. PDRB per kapita Kota Solok berada pada peringkat enam di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Jika hanya fokus pada kota-kota di Provinsi Sumatera Barat, PDRB per kapita Kota Solok menempati posisi kedua terendah atau hanya diatas PDRB Kota Payakumbuh. Walaupun demikian, PDRB per kapita Kota Solok masih berada di bawah PDRB per kapita nasional baik PDRB nominal per kapita (Rp. 59,08 juta) dan PDRB riil per kapita (Rp. 40,84 juta). Kondisi ini tidak mengalami perubahan yang berarti semenjak kehadiran pandemi COVID-19 tahun 2020. COVID-19 telah memperburuk tingkat kesejahteraan penduduk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan memperhatikan posisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Solok diantara

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat maka pembangunan ekonomi terpadu diharapkan juga dapat meningkatkan posisi PDRB per kapita Solok pada level Provinsi Sumatera Barat.

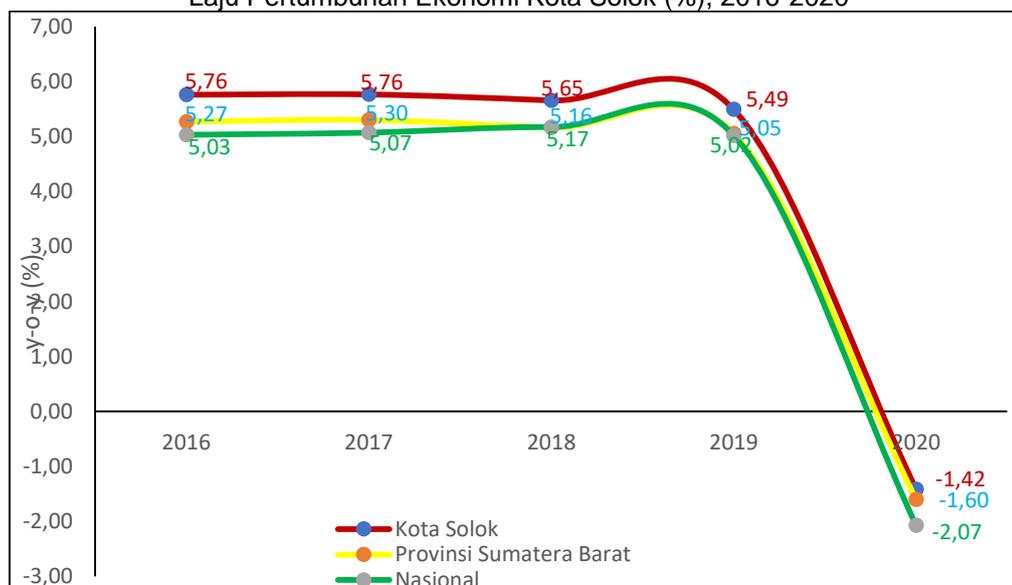
4.2. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi terpadu Kota Solok. Dalam rentang waktu 2016-2020 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok sebesar 4,25% per tahun diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,64% per tahun dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,84% per tahun. Dengan pola laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok yang relatif mengikuti pola laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera mengindikasikan perekonomian Kota Solok terpengaruh oleh kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Pada saat laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat mengalami kontraksi akibat COVID-19 2020, saat yang sama laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok juga mengalami kontraksi. Pandemi COVID-19 telah mendisrupsi hampir seluruh sektor ekonomi terutama sektor yang menghendaki pelaku ekonomi berhubungan langsung dalam aktivitas ekonomi riil baik di sisi penawaran maupun sisi permintaan. Di masa pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi Kota Solok mengalami kontraksi sebesar -1,42%, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional mengalami kontraksi masing-masing sebesar -1,60% dan -2,07%.

Untuk memahami sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat dianalisis melalui sisi penawaran dan sisi permintaan. Sumber laju pertumbuhan ekonomi pada sisi penawaran beragam antar sektor ekonomi. Keberagaman ini disebabkan perbedaan kapasitas produksi, pasar, penggunaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, perdagangan dan persaingan yang dihadapi oleh masing-masing

sektor ekonomi. Kinerja laju pertumbuhan sektor ekonomi yang mendominasi perekonomian Kota Solok sebelum COVID-19 seperti transportasi, perdagangan dan reparasi, dan konstruksi berkisar antara 5% - 7%. Namun, COVID-19 telah menyebabkan sektor transportasi, perdagangan dan reparasi berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 masing-masing sebesar -9,39%, -0,23%, dan -2,87%. Kontraksi ketiga sektor yang mendominasi perekonomian Kota Solok ini secara langsung telah menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi agregat Kota Solok berkontraksi cukup tajam tetapi masih dibawah Provinsi Sumatera Barat dan nasional.

Gambar 4.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok (%), 2016-2020

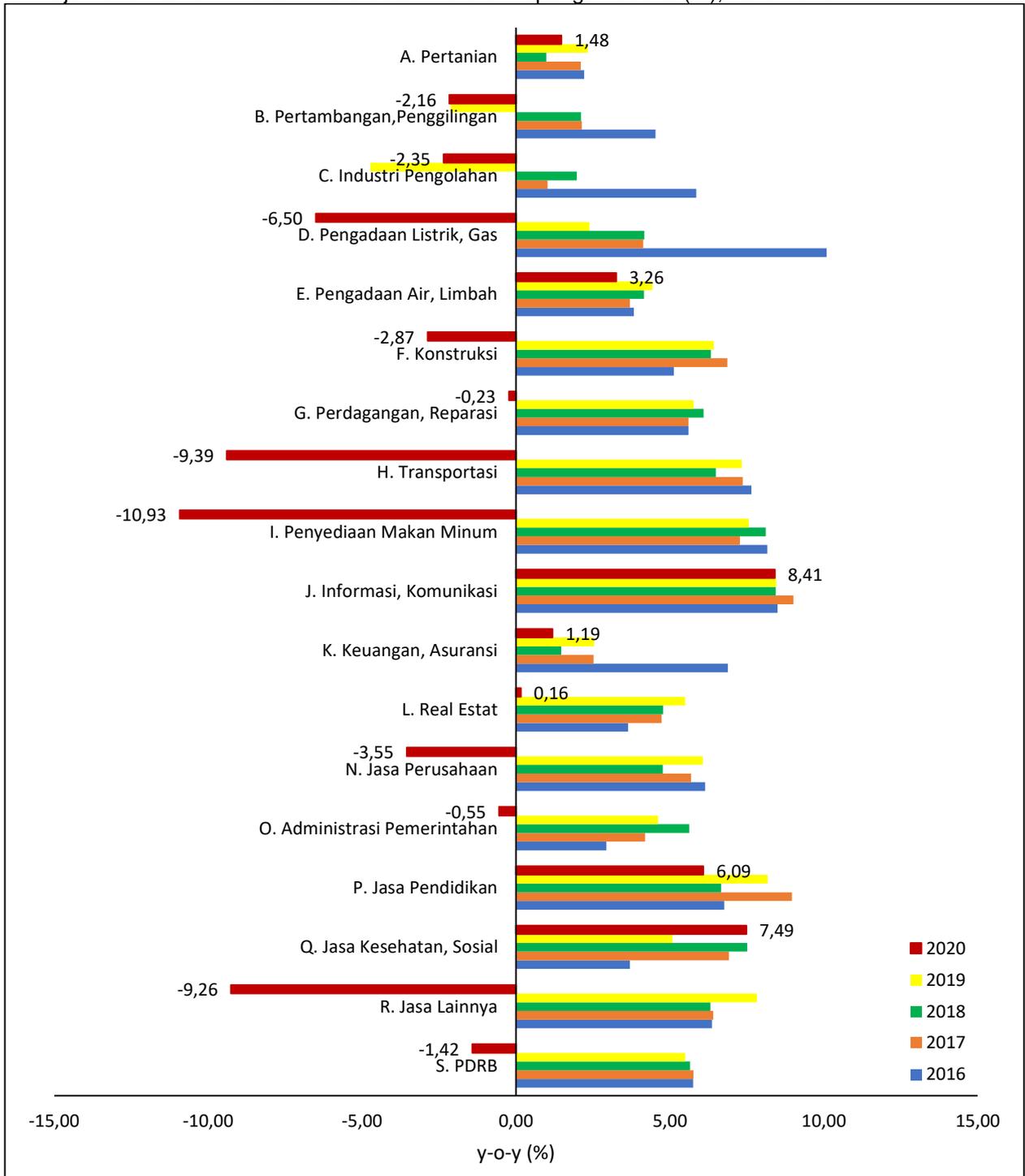


Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/> diakses 2021

COVID-19 tidak hanya mendisrupsi sektor-sektor dominan dalam struktur perekonomian Kota Solok, tetapi juga mendisrupsi hampir keseluruhan sektor ekonomi kecuali sektor pertanian, pengadaan air dan limbah, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, real estat, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan sosial. Berbagai ahli ekonomi menjustifikasi bahwa dampak COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi berbeda dengan dampak krisis keuangan.

COVID-19 telah berdampak menyeluruh baik sisi produksi maupun sisi permintaan. Penerapan protokol kesehatan telah membatasi aktivitas pelaku ekonomi riil sebagai upaya mengurangi penyebaran COVID-19 juga turut andil dalam menghambat sirkular perekonomian berjalan secara normal di Kota Solok.

Gambar 4.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (%), 2016-2020



Sumber: <https://solokkota.bps.go.id/> diakses 2021

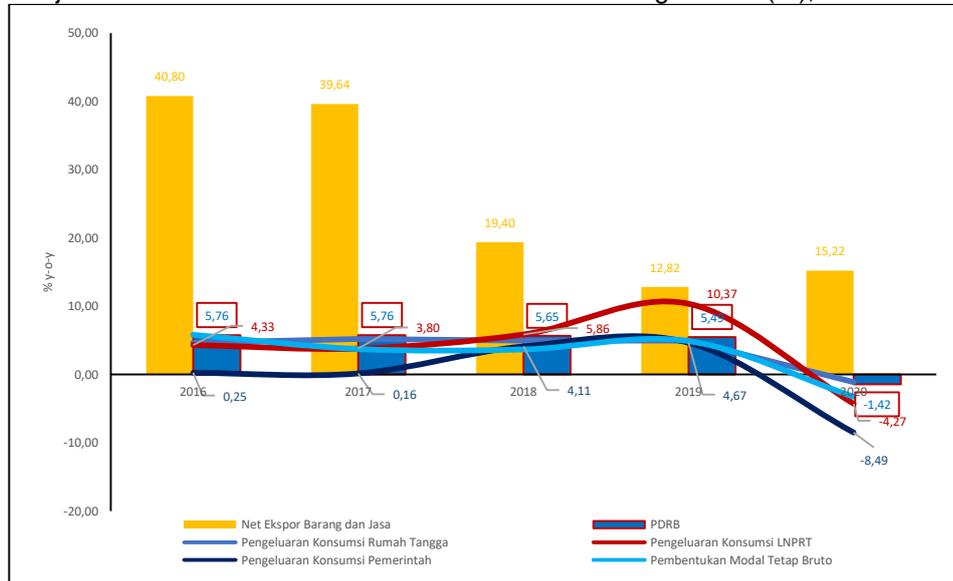
Pada saat kebanyakan sektor ekonomi mengalami kontraksi akibat COVID-19, ada beberapa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif.

Diantara sektor ekonomi bertumbuh positif di masa pandemi COVID-19 adalah sektor pertanian, pengadaan air dan limbah, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, real estat, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan sosial. Pada masa pandemi COVID-19 sektor-sektor ekonomi mengalami pertumbuhan diatas 6% adalah informasi dan komunikasi sebesar 8,41%, jasa pendidikan tumbuh sebesar 6,09%, dan jasa kesehatan dan sosial mengalami pertumbuhan sebesar 7,49%. Penerapan protokol kesehatan yang ketat telah mendorong keberlangsungan kegiatan ekonomi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan juga permintaan produk kesehatan meningkat.

Tidak hanya dari sisi penawaran, analisis sumber pertumbuhan ekonomi Kota Solok penting menelusuri sisi permintaan oleh pengguna akhir. Selama periode 2016-2020, laju komponen pertumbuhan ekonomi sisi permintaan beragam dan berfluktuasi. Komponen pertumbuhan ekonomi sisi permintaan berfluktuasi adalah pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Pada periode 2016-2020, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT berkisar antara 4% hingga 11%. Sementara itu, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah berada pada kisaran 0.25% - 6%. Selanjutnya, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga berkisar 4%-5%. Sedangkan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Solok mengalami laju pertumbuhan pada kisaran 3%-6%. Fluktuasi laju pertumbuhan PMTB mencerminkan naik turunnya aktivitas berinvestasi Kota Solok. Naik turunnya laju pertumbuhan PMTB mengindikasikan minat investor dan juga kemampuan pemerintah Kota Solok dalam menarik investor menanamkan modalnya di Kota Solok terutama bentuk investasi fisik (*physical capital*). Investasi fisik memiliki peran yang tidak dapat diabaikan karena investasi fisik secara tidak langsung mendukung aktivitas produksi pada berbagai sektor ekonomi sehingga dapat

meningkatkan output Kota Solok. Pada saat bersamaan investasi dapat pula menyediakan berbagai kesempatan kerja dan berusaha.

Gambar 4.5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Menurut Pengeluaran (%), 2016-2020

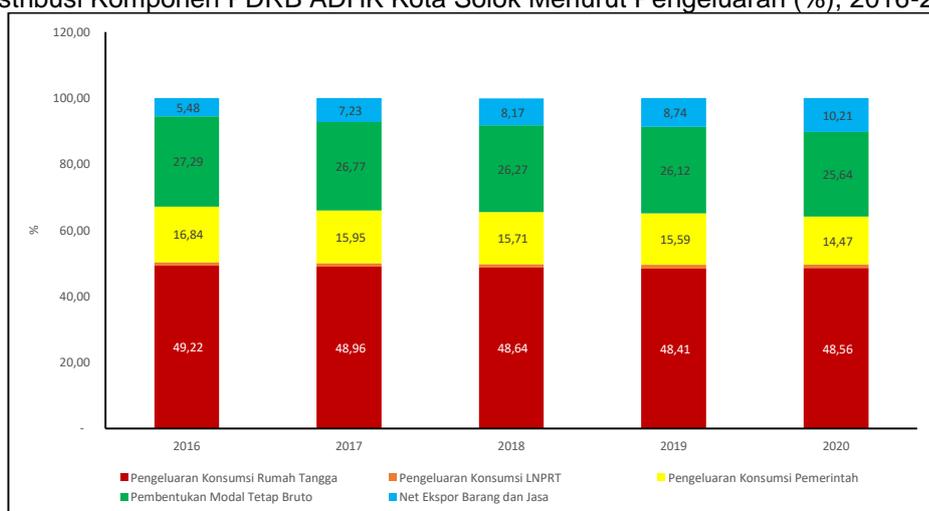


Sumber: <https://solokkota.bps.go.id/> diakses 2021

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, komponen pengeluaran Kota Solok tumbuh secara positif dan berfluktuasi. Pada saat COVID-19 berlangsung, seluruh komponen sisi pengeluaran berkontraksi. Penurunan pertumbuhan paling tajam terlihat pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tercatat sebesar -8,49%. Fakta ini juga terdapat pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT menurun ke laju pertumbuhan sebesar -4,27%, PMTB sebesar -3,25%, dan pengeluaran rumah tangga sebesar -1,10%. COVID-19 tidak hanya menyebabkan sebagian besar sumber pertumbuhan sisi penawaran mengalami kontraksi, tetapi juga pada sisi pengeluaran pemerintah Kota Solok. Kebijakan *refocussing* anggaran belanja pemerintah, barang, modal dan bantuan sosial (bansos) telah berdampak pada belanja pegawai, barang dan modal di Kota Solok. Tidak hanya itu, *refocussing* anggaran belanja pemerintah juga tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Jika ditelusuri komponen sisi permintaan, komponen yang masih mengalami pertumbuhan positif pada masa

pandemi COVID-19 adalah perdagangan bersih yang tumbuh sebesar 15,22%. Kondisi ini menyatakan bahwa Kota Solok masih mampu mendorong peningkatan perdagangan dengan dengan daerah luar Kota Solok atau dengan kata lain permintaan produk dari luar Kota Solok pada masa pandemi COVID-19 masih mengalami peningkatan.

Gambar 4.6.
Distribusi Komponen PDRB ADHK Kota Solok Menurut Pengeluaran (%), 2016-2020



Sumber: <https://solokkota.bps.go.id/> diakses 2021

Tidak hanya pada sisi penawaran perubahan struktur perekonomian Kota Solok berjalan lambat, pada sisi permintaan juga tidak jauh berbeda. Peran investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kota Solok justru mengalami penurunan. Sementara itu, peran konsumsi rumah tangga sebagai sumber penggerak perekonomian masih sangat dominan. Secara teoritikal pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada konsumsi rumah tangga dalam jangka panjang akan melemahkan fondasi perekonomian Kota Solok. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi terpadu dimasa depan diharapkan dapat mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi terutama pada sektor riil sebagai tumpuan menggerakkan roda perekonomian Kota Solok. Pembangunan ekonomi terpadu menjadi strategi yang mempercepat transformasi Kota Solok dengan tetap bertumpu pada riil khususnya sektor perdagangan dan jasa. Peran sektor

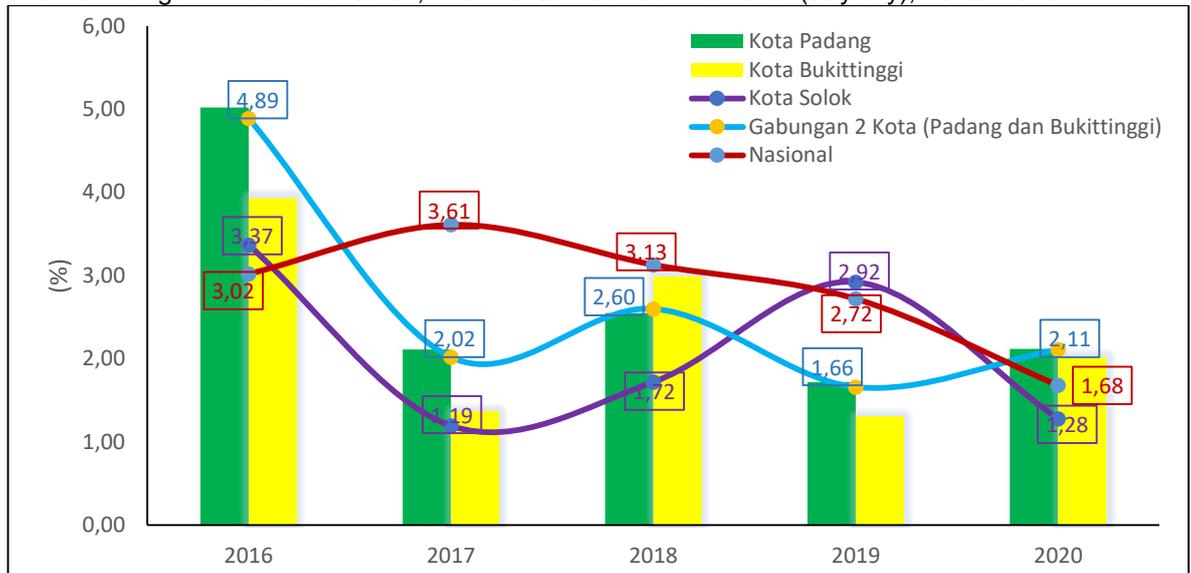
perdagangan dan jasa tidak hanya mendorong sisi penawaran, tetapi juga memperkuat sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, sektor perdagangan dan jasa telah mendorong peningkatan perdagangan bersih (net ekspor). Strategi pembangunan terpadu nantinya diharapkan dapat meningkatkan peran net ekspor dalam perekonomian Kota Solok. Dengan memfokuskan sektor perdagangan sebagai *leading* pembangunan ekonomi terpadu maka dapat meningkatkan peluang Kota Solok dalam mengakselerasi terwujudnya visi sebagai sentra perdagangan.

4.3. Inflasi

4.3.1. Perkembangan Inflasi Kota Solok

Pembangunan ekonomi terpadu mensyaratkan pembangunan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Kondisi stabilitas ekonomi antarwaktu dapat diukur dari stabilitas harga. Keberhasilan mencapai stabilitas harga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi produktif dan mendorong permintaan efektif masyarakat. Pembangunan ekonomi terpadu diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan peningkatan permintaan efektif yang didukung oleh harga yang stabil. Jika harga dapat dipertahankan stabil antarwaktu maka kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai. Sebaliknya, strategi pembangunan ekonomi terpadu akan mengalami hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika masih dibayangi oleh inflasi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi terpadu tidak dapat melepaskan pentingnya memperhatikan stabilitas harga (inflasi). Secara umum, kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak mempublikasi data inflasi, tetapi dapat dianalisis menggunakan PDRB deflator dengan tetap memperhatikan data inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Gambar 4.7.
Perkembangan Inflasi Kota Solok, Provinsi Sumbar dan Nasional (% y-o-y), 2016- 2020



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/> diakses 2021 (diolah)

Berdasarkan data PDRB deflator, laju inflasi Kota Solok sebesar 2,10% per tahun selama rentang waktu 2016-2019. Inflasi Kota Solok berada dibawah laju inflasi Kota Padang sebesar 2,70% per tahun dan Kota Bukittinggi sebesar 2,32% per tahun, serta gabungan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebesar 2,66% per tahun. Laju inflasi Kota Solok, gabungan Kota Padang dan Kota Bukittinggi lebih berfluktuatif dibandingkan dengan laju inflasi nasional. Pada saat COVID-19, laju inflasi Kota Solok hanya mencapai 1,28%. Kondisi ini memperlihatkan inflasi Kota Solok masih berada dibawah laju inflasi nasional sebesar 1,68% dan gabungan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebesar 2,11%. Rendahnya inflasi agregat Kota Solok mengindikasikan stabilitas harga yang terkendali. Inflasi yang relatif rendah dapat mendorong peningkatan daya beli konsumen akhir di Kota Solok. Selama pandemi COVID-19, inflasi yang rendah disebabkan rendahnya permintaan dan terjaganya pasokan pangan kebutuhan masyarakat. Walaupun harga relatif stabil, permintaan produk penyumbang inflasi masih berada dibawah penawaran sehingga inflasi menjadi relatif stabil. Inflasi Kota Solok yang relatif stabil merupakan kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi terpadu.

4.3.2. Inflasi menurut Kelompok Barang Dan Jasa

Disagregasi inflasi dilakukan untuk menelusuri sumber-sumber inflasi. Disagregasi inflasi Kota Solok mengacu pada laporan Bank Indonesia Padang yang melihat data inflasi menurut kelompok barang dan jasa. Informasi disagregasi menggunakan data Provinsi Sumatera Barat karena data disagregasi inflasi untuk Kota Solok belum tersedia. Perhitungan inflasi Provinsi Sumatera Barat menggunakan basis data survei Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, analisis inflasi menurut kelompok barang dan jasa Kota Solok diasumsikan identik dengan data disagregasi inflasi gabungan Kota Padang dan Bukittinggi untuk tahun 2021.

Menurut data inflasi triwulanan tahun 2021, laju inflasi Sumatera Barat pada triwulanan II tahun 2021 mengalami penurunan dari triwulanan I. Penurunan inflasi agregat ditunjukkan oleh penurunan disagregasi inflasi menurut kelompok barang dan jasa. Pada perubahan triwulanan I ke triwulanan II tahun 2021 telah terjadi pergeseran komposisi komoditas penyumbang inflasi. Komposisi penyumbang inflasi pada triwulanan II tahun 2021 disebabkan peningkatan harga secara umum di kelompok makanan, minuman, rokok dan tembakau, kelompok kesehatan, kelompok rekreasi, olah raga dan budaya, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi pada kelompok makanan, minuman, rokok dan tembakau mengalami penurunan dari 3,78% pada triwulan I tahun 2021 menjadi 3,20% pada triwulan II pada tahun 2021.

Selanjutnya, inflasi pada kelompok kesehatan juga mengalami penurunan dari 5,03% pada triwulan I pada tahun 2021 menjadi 4,87% pada triwulan II tahun 2021. Sementara itu, inflasi pada kelompok rekreasi, olah raga dan budaya menurun dari 4,51% pada triwulan I tahun 2021 menjadi 4,49% di triwulan II tahun 2021. Sebaliknya, inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan dari 2,34% pada triwulan I tahun 2021 menjadi 3,36% pada

triwulan II tahun 2021. Dari pergeseran komposisi inflasi terlihat bahwa kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,58 pada triwulan II tahun 2021. Pembatasan mobilitas orang dalam melaksanakan protokol kesehatan merupakan penyebab utama terjadinya deflasi pada kelompok komoditas transportasi. Pembatasan aktivitas masyarakat terutama kebijakan pembatasan mobilitas pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

Tabel 4.4.
Perbandingan Inflasi dan andil inflasi Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020

Komoditas	2021			
	Triwulan I		Triwulan II	
	% Inflasi (yoy)	% Andil (yoy)	% Inflasi (yoy)	% Andil (yoy)
Umum	1.78		1.74	
Makanan, minuman, rokok dan tembakau	3.78	1.15	3.20	0.96
Pakaian dan alas kaki	0.48	0.03	0.62	0.04
Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya	0.27	0.04	0.48	0.07
Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga	1.51	0.06	1.39	0.06
Kesehatan	5.03	0.09	4.87	0.08
Transportasi	-0.40	-0.06	-0.58	-0.08
Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	-1.45	-0.07	0.45	-0.02
Rekreasi, budaya, dan olahraga	4.51	0.09	4.49	0.09
Pendidikan	1.43	0.08	1.49	0.08
Penyediaan makanan dan minuman/restoran	2.75	0.27	2.31	0.22
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	2.34	0.14	3.36	0.29

Sumber: Diolah dari <https://sumbar.bi.go.id/> diakses 2021

Gambar 4.8. Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Barang dan Jasa TW-II (%), 2021



Sumber: BI 2021

Selain menganalisis perubahan inflasi, eksplorasi andil dari masing-masing kelompok barang dan jasa dapat pula dilakukan. Analisis andil inflasi berguna untuk memahami kelompok barang dan jasa yang berperan dalam pembentukan inflasi. Kelompok makanan, minuman, rokok dan tembakau masih merupakan penyumbang dominan pembentukan inflasi, yakni 1,15% pada triwulan I tahun 2021 dan 0,96% pada triwulan II tahun 2021. Andil kelompok bersumber pada komoditas daging ayam ras, ikan tongkol, ikan nila, jengkol, rokok kretek filter, dan rokok putih. Sementara, kelompok barang dan jasa lainnya memiliki andil kurang dari 1% terhadap inflasi. Kelompok kesehatan memiliki andil sebesar 0,09% pada triwulan I tahun 2021 dan 0,08% pada triwulan II tahun 2021. Sementara kelompok

pendidikan tidak mengalami perubahan komposisi dimana tercatat memiliki andil sebesar 0,08%.

Pergerakan inflasi dan faktor penyebab inflasi pada triwulan I dan triwulan II tahun 2021 diduga disebabkan permintaan produk, terbatasnya pasokan, dan peningkatan biaya produksi pada kelompok barang dan jasa. Untuk kelompok makanan, minuman, rokok, dan tembakau terlihat pada komoditas daging ayam ras, ikan tongkol, ikan nila, jengkol, rokok kretek filter, dan rokok putih. Sedangkan pada kelompok bukan makanan adalah komoditas bahan bakar rumah tangga dan emas perhiasan. Namun sebagaimana dikemukakan sebelumnya, secara agregat, inflasi Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan. Kondisi inflasi yang relatif stabil dan terkendali merupakan kondisi yang baik untuk dipertahankan dalam pembangunan ekonomi terpadu dan terintegrasi.

Stabilitas inflasi tidak dapat dilepaskan dari berbagai upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat dalam mengendalikan inflasi. Diantara pertemuan penting dari TPID adalah pada bulan Ramadhan 1442 H dimana TPID se-Sumatera Barat menyelenggarakan *High Level Meeting* (HLM) pada tanggal 7 April 2021. HLM TPID juga melakukan sinergi dengan Bappenas dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) melalui *focus group discussion* (FGD). Hasil HLM TPID pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442H, diantaranya penyelenggaraan operasi pasar murah secara *online*, pengawasan harga bahan pangan seperti gula pasir dan minyak goreng tidak melebihi HET, *monitoring* kelancaran distribusi bahan pangan, dan mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak.

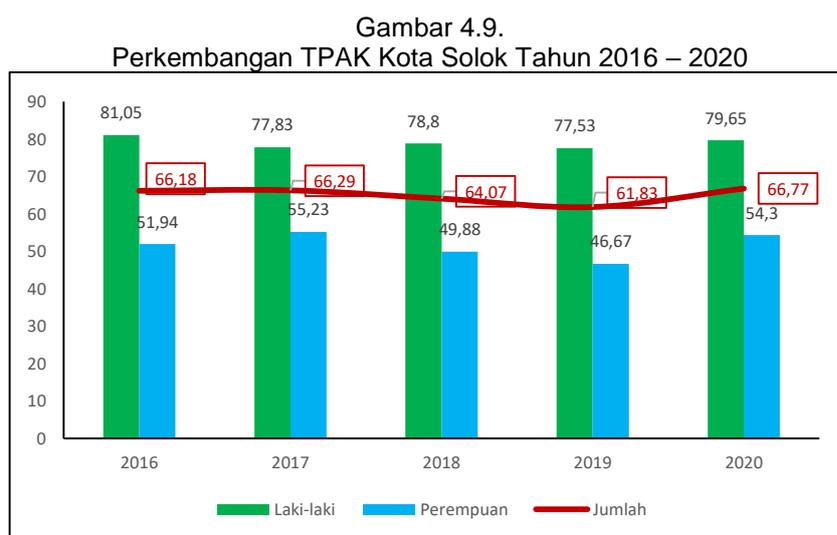
4.4. Pengangguran dan Kesempatan Kerja

Pembangunan ekonomi terpadu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok melalui perluasan kesempatan kerja sebagai upaya mengurangi pengangguran. Untuk mengukur kondisi

ketenagakerjaan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur besarnya penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Sementara itu, TPT mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

4.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

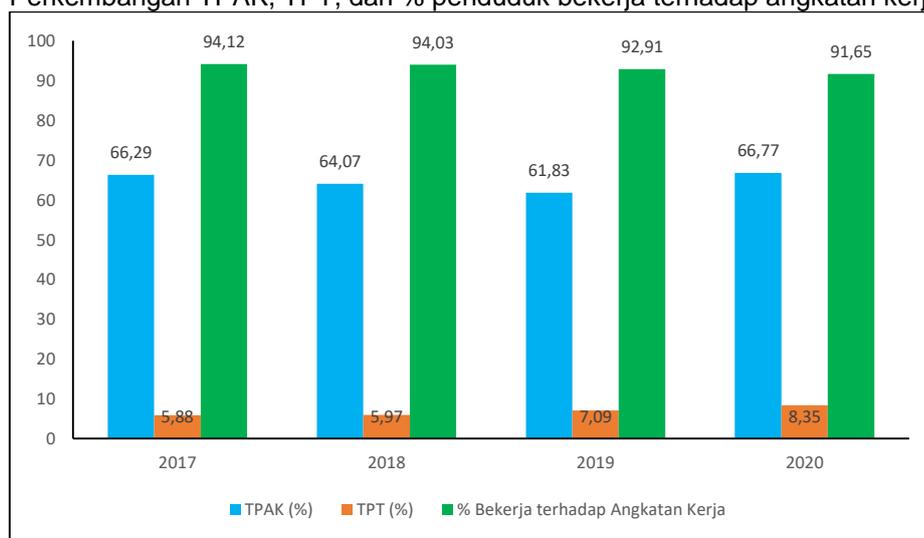
Analisis TPAK memberikan pemahaman penawaran tenaga kerja (*labor supply*) yang berguna untuk menyusun strategi pembangunan ekonomi terpadu. Dalam rentang waktu 2016-2020, TPAK Kota Solok terlihat berfluktuasi. TPAK Kota Solok pada tahun 2020 sebesar 66,77 % dimana dapat diinterpretasikan bahwa dari angkatan kerja terdapat 66,77% penduduk usia kerja. Jika ditelusuri secara spesifik, TPAK juga tampak berfluktuasi menurut jenis kelamin tetapi angka TPAK penduduk jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan. Partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih besar dari perempuan mencerminkan disparitas gender pada penawaran tenaga kerja di Kota Solok.



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/> diakses 2021

Secara harfiah, peningkatan TPAK antar waktu tidak dapat secara langsung diinterpretasikan sebagai perbaikan kondisi ketenagakerjaan pada suatu daerah. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan terjadi jika peningkatan TPAK berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja bersamaan dengan penurunan jumlah pengangguran. Namun, jika kenaikan TPAK berkebalikan dengan penurunan tingkat pengangguran maka dapat diartikan tidak terjadi perbaikan pada kondisi ketenagakerjaan. Fakta menemukan bahwa kenaikan TPAK Kota Solok tidak beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja, tetapi pada saat bersamaan terjadi tingkat pengangguran terbuka.

Gambar 4.10.
Perkembangan TPAK, TPT, dan % penduduk bekerja terhadap angkatan kerja

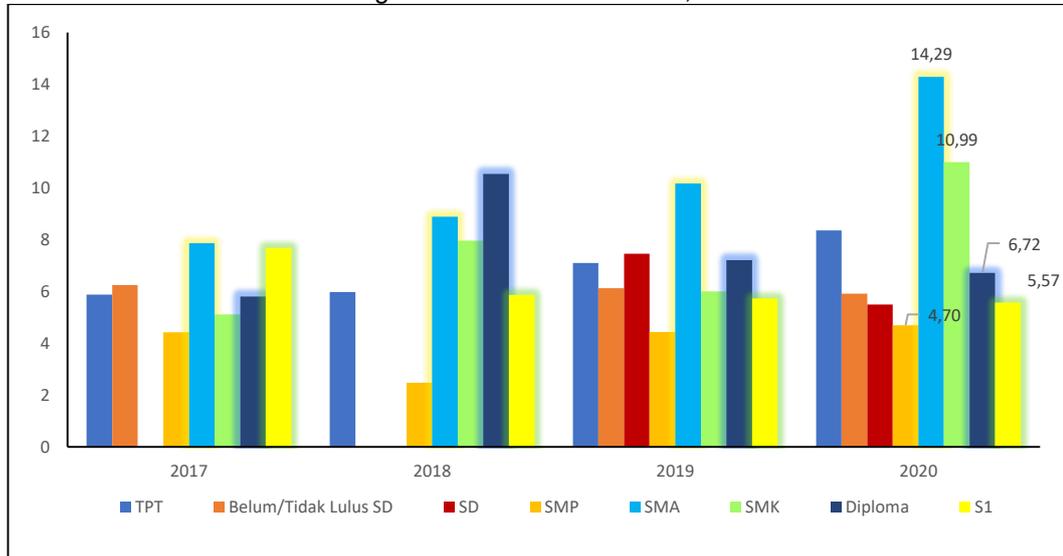


Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/> diakses 2021

Selama periode 2017-2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Solok mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 TPT Kota Solok sebesar 5,88% meningkat menjadi 8,35% pada tahun 2020. Tren TPT dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kondisi ini diperburuk (*exacerbate*) pula oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan aktivitas ekonomi mengalami kontraksi dan berakibat pada menurunnya penyerapan tenaga kerja. Pada saat

pandemi COVID-19 sebagian besar sektor ekonomi mengalami kesulitan dalam berekspansi dan perluasan kesempatan kerja.

Gambar 4.11.
Perkembangan TPT Menurut Lulusan, 2017 - 2020



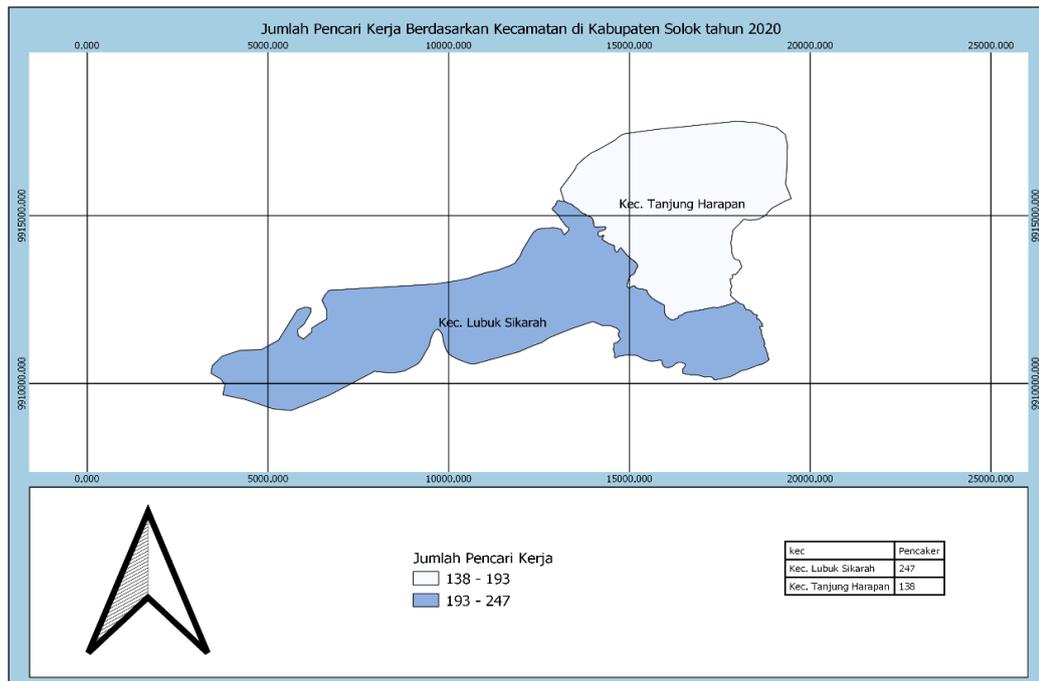
Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/> diakses 2021

Selain menganalisis TPT secara agregat, pemahaman spesifik terhadap kondisi TPT menurut tingkat Pendidikan penting pula dilakukan. Pemahaman ini diperlukan dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi terpadu. Pemahaman kondisi tingkat pendidikan memberikan basis bagi pembangunan ekonomi terpadu dalam memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Pada tahun 2000 TPT Kota Solok didominasi oleh penduduk lulusan SMA sebesar 14,29% dan SMK sebesar 10,99%. Kondisi TPT lulusan SMA dan SMK mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017. Sementara, TPT lulusan S1 memiliki kecenderungan menurun dari 7,68% pada tahun 2017 menjadi 5,57% pada tahun 2020. Selanjutnya, TPT lulusan diploma tampak berfluktuatif pada kisaran 6%-10%. Dominasi TPT lulusan SMA dan SMK dapat disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya: siswa yang menamatkan SMA atau SMK tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, terbatasnya lapangan pekerjaan bagi tamatan SMA atau SMK, kemampuan yang diperoleh dari

pendidikan SMA atau SMK tidak memenuhi persyaratan dunia usaha dan dunia industri (*missmatch*). Selain itu, keterampilan tamatan SMA dan SMK untuk berwirausaha (*entrepreneurship*) secara mandiri masih sangat terbatas. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya kurangnya pengetahuan dan keahlian/keterampilan yang dimiliki disebabkan kurikulum pada saat SMA atau SMK tidak mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan ataupun tidak memiliki modal untuk berusaha sendiri.

Dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi terpadu penting pula memperhatikan sisi kewilayahan dari pencari kerja. Dengan memahami posisi kewilayahan daftar pencari kerja maka strategi pembangunan ekonomi terpadu dapat lebih terarah dalam menurunkan tingkat pengangguran dimasing-masing wilayah. Dengan mempertimbangkan sisi kewilayahan maka pada tahun 2020 memperlihatkan bahwa pencari kerja yang terdaftar sebagian besar (64,16% atau 247 orang) berada di Kecamatan Lubuk Sikarah. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa penduduk menganggur lebih banyak di Kecamatan Lubuk Sikarah dibandingkan dengan Kecamatan Tanjung Harapan. Jika ditelusuri lebih lanjut, komposisi pencari kerja terdaftar dari Lubuk Sikarah didominasi oleh laki-laki yakni sebesar 152 orang atau 61,54%. Secara keseluruhan proporsi pencari kerja terdaftar berjenis kelamin laki-laki sebesar 64,94% dan perempuan sebesar 35,06%.

Gambar 4.12.
Distribusi Pencari Kerja Terdaftar Berdasarkan Kecamatan di Kota Solok tahun 2020

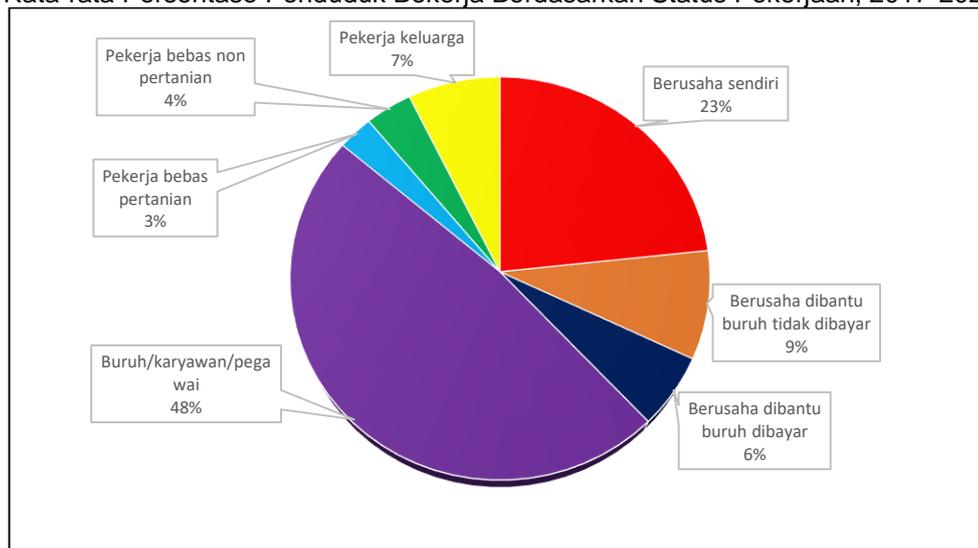


Sumber: <https://solokkota.bps.go.id/> (data diolah) diakses 2021

Dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi terpadu penting menciptakan *multiplier effect* bagi pendapatan tenaga kerja. Penciptaan *multiplier effect* tenaga kerja terkait erat dengan status pekerjaan. Status pekerjaan yang berusaha sendiri dengan dibantu oleh buruh/karyawan akan memiliki angka pengganda yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Jika dilihat status pekerjaan di Kota Solok maka sebagian besar (48%) merupakan buruh/karyawan/pegawai. Posisi kedua ditempati oleh penduduk yang berusaha sendiri tanpa dibantu oleh buruh tidak dibayar sebesar 23%. Sementara penduduk yang berusaha sendiri yang dibantu oleh buruh dibayar sebesar 6%. Dengan kondisi status pekerjaan ini maka kedepannya pembangunan ekonomi terpadu diarahkan pada perluasan kesempatan berusaha yang didukung lingkungan bisnis yang kondusif. Semakin besar proporsi penduduk yang berusaha sendiri maka dampak yang kedepan (*forward linkages*) dan kebelakang (*backward linkages*) yang ditimbulkannya bagi

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Solok. Oleh karena itu, untuk memperluas dampak pembangunan ekonomi terpadu maka kedepannya pemerintah Kota Solok penting mempersiapkan program dan kebijakan yang mendorong kesempatan berusaha bagi penduduk sebagai upaya menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Gambar 4.13.
Rata-rata Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan, 2017-2020



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/> diakses 2021

4.5. Kondisi Kemiskinan di Kota Solok

Kemiskinan masih merupakan persoalan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh hampir seluruh daerah. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan mengacu pada konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pengukuran kemiskinan yang menggunakan pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan melalui sisi pengeluaran.

4.5.1. Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

Selama rentang waktu 2016-2020 garis kemiskinan Kota Solok mengalami peningkatan dari Rp.385.781,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.450.254,00 pada tahun 2020. Kenaikan garis kemiskinan mengimplikasikan standar hidup dalam menentukan jumlah penduduk miskin mengalami perbaikan. Secara rata-rata garis kemiskinan Kota Solok menempati peringkat 6 (enam) dari kabupaten/kota tetapi masih berada dibawah garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

Table 4.5.
Garis kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten						
1	Kepulauan Mentawai	263.793	280.695	294.284	310.033	340.191
2	Pesisir Selatan	366.228	390.955	409.882	431.817	467.743
3	Kab. Solok	376.748	400.887	408.570	415.649	451.906
4	Sijunjung	344.153	365.074	379.046	400.861	433.147
5	Tanah Datar	346.267	361.037	369.833	379.041	420.049
6	Padang Pariaman	374.636	385.736	402.960	411.182	455.463
7	Agam	315.804	327.004	341.372	379.304	424.728
8	Lima Puluh Kota	357.824	370.506	388.689	403.030	451.295
9	Pasaman	307.552	320.478	334.800	347.153	388.726
10	Solok Selatan	326.733	347.667	364.498	387.438	419.442
11	Dharmasraya	374.642	398.408	414.096	439.117	477.421
12	Pasaman Barat	367.159	382.820	402.877	417.742	467.769
Kota						
1	Padang	449.658	482.763	507.042	534.857	570.654
2	Kota Solok	385.781	413.297	414.673	440.618	450.254
3	Sawahlunto	318.721	337.682	354.665	374.615	399.688
4	Padang Panjang	420.981	424.298	438.075	450.377	491.142
5	Bukittinggi	420.478	441.087	459.371	475.755	519.470
6	Payakumbuh	424.233	441.736	462.243	482.184	526.490
7	Pariaman	392.970	412.231	431.368	446.514	480.028
SUMATERA BARAT (Provinsi)		425.141	453.612	476.554	503.652	544.315

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/> diakses 2021

Penentuan garis kemiskinan secara langsung mempengaruhi jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Solok. Meskipun garis kemiskinan Kota Solok mengalami kenaikan, jumlah penduduk miskin turun dari 2,59 ribu jiwa pada tahun 2016 menjadi 1,99 ribu jiwa pada tahun 2020. Selama periode 2016-2020 jumlah penduduk miskin Kota Solok mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,24%. Rata-rata persentase penurunan jumlah penduduk miskin Kota Solok jauh melampaui rata-rata persentase penurunan penduduk kemiskinan Provinsi Sumatera Barat yang hanya sebesar 1,90%. Cakupan pengentasan jumlah penduduk miskin tidak seluas Provinsi Sumatera Barat telah membuat pemerintah

daerah dapat memfokuskan program-program pengentasan kemiskinan di Kota Solok.

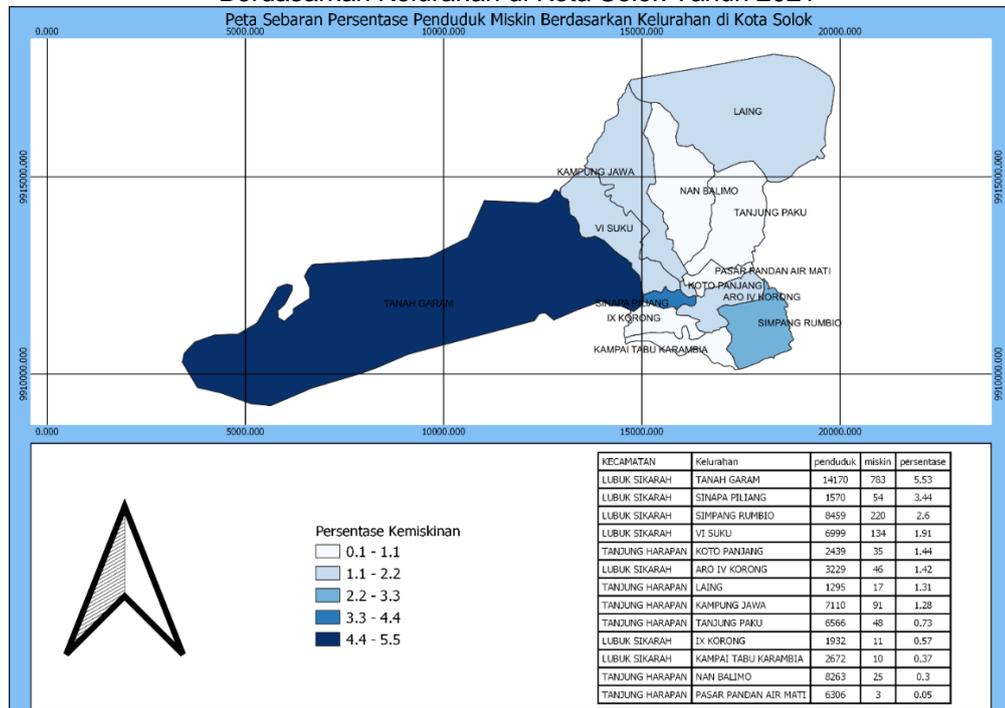
Table 4.6.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					Persentase Penduduk Miskin (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Kabupaten										
1	Kepulauan Mentawai	13.09	12.95	12.99	13.22	13.37	15.12	14.67	14.44	14.43	14.35
2	Pesisir Selatan	35.86	35.53	34.92	36.51	35.46	7.92	7.79	7.59	7.88	7.61
3	Kab.Solok	34.06	33.33	32.89	29.74	29.28	9.32	9.06	8.88	7.98	7.81
4	Sijunjung	17.12	16.83	16.55	16.65	16.28	7.60	7.35	7.11	7.04	6.78
5	Tanah Datar	19.63	19.27	18.48	16.20	15.34	5.68	5.56	5.32	4.66	4.40
6	Padang Pariaman	36.34	34.70	33.20	29.48	28.98	8.91	8.46	8.04	7.10	6.95
7	Agam	37.55	36.57	32.92	33.10	33.31	7.83	7.59	6.76	6.75	6.75
8	Lima Puluh Kota	28.57	26.93	26.47	26.64	26.43	7.59	7.15	6.99	6.97	6.86
9	Pasaman	20.83	20.38	20.31	20.22	20.29	7.65	7.41	7.31	7.21	7.16
10	Solok Selatan	11.91	11.89	11.85	12.49	12.39	7.35	7.21	7.07	7.33	7.15
11	Dharmasraya	16.24	15.63	15.42	15.49	15.70	7.16	6.68	6.42	6.29	6.23
12	Pasaman Barat	30.76	30.84	31.83	31.53	31.64	7.40	7.26	7.34	7.14	7.04
	Kota										
1	Padang	42.56	43.75	44.04	42.44	42.17	4.68	4.74	4.70	4.48	4.40
2	Kota Solok	2.59	2.50	2.29	2.29	1.99	3.86	3.66	3.30	3.24	2.77
3	Sawahlunto	1.34	1.23	1.48	1.35	1.36	2.21	2.01	2.39	2.17	2.16
4	Padang Panjang	3.47	3.22	3.11	3.00	2.84	6.75	6.17	5.88	5.60	5.24
5	Bukittinggi	6.81	6.75	6.32	6.00	6.01	5.48	5.35	4.92	4.60	4.54
6	Payakumbuh	8.35	7.72	7.69	7.68	7.74	6.46	5.88	5.77	5.68	5.65
7	Pariaman	4.47	4.49	4.40	4.20	3.66	5.23	5.20	5.03	4.76	4.10
	SUMATERA BARAT (Provinsi)	371.55	364.51	357.13	348.22	344.23	7.09	6.87	6.65	6.42	6.28

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/> diakses 2021

Cakupan pengentasan kemiskinan di Kota Solok dapat ditelusuri dari wilayah kelurahan. Data dan informasi kemiskinan Kota Solok menggunakan data rekapitulasi desil 1 kelurahan publikasi Dinas Sosial Kota Solok tahun 2020. Persentase penduduk miskin di Kecamatan Lubuk Sikarah mencapai 2,26% dan Kecamatan Tanjung Harapan sebesar 0,85%. Jika ditelusuri sebaran penduduk miskin menurut kelurahan di Kecamatan Lubuk Sikarah maka terlihat bahwa sebaran penduduk miskin tertinggi berada di Kelurahan Tanah Garam (5,53%), Sinapa Piliang (3,44%), Simpang Rumbio (2,6%), dan VI Suku (1,91%). Mencermati data sebaran kemiskinan ini maka pembangunan ekonomi terpadu dalam mengentaskan kemiskinan seharusnya difokuskan pada kelurahan-kelurahan yang menjadi kantong kemiskinan.

Gambar 4.14.
Peta Sebaran Persentase Penduduk Miskin
Berdasarkan Kelurahan di Kota Solok Tahun 2021



Sumber: Dinas Sosial Kota Solok, 2021 (Data Diolah)

4.5.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Pembangunan ekonomi terpadu dengan fokus pada strategi pengentasan kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi memerlukan ketersediaan analisis Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). P1 memberikan informasi kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tinggi atau rendahnya nilai P1 memberikan informasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi atau mendekati garis kemiskinan. Data P1 juga memberikan gambaran semakin merata atau timpang diantara penduduk miskin. Dengan memahami informasi P1 secara baik dan tepat maka perumusan strategi, kebijakan, program-program pengentasan kemiskinan dapat menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Penyusunan program-program dan perancangan biaya-biaya pengentasan kemiskinan yang melibatkan seluruh stakeholders akan lebih berdaya guna dan mempercepat pengurangan kemiskinan.

Table 4.7.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kabupaten					
1	Kepulauan Mentawai	2,56	2,58	2,42	1,87	2,84
2	Pesisir Selatan	1,17	1,07	0,77	0,76	0,81
3	Kab, Solok	1,19	1,11	1,40	0,71	1,16
4	Sijunjung	1,25	1,12	0,88	0,94	0,97
5	Tanah Datar	0,81	0,55	0,87	0,42	0,42
6	Padang Pariaman	1,36	1,13	1,25	1,02	0,67
7	Agam	0,96	0,96	1,13	0,82	0,79
8	Lima Puluh Kota	1,06	1,09	1,09	0,51	0,78
9	Pasaman	0,42	0,80	0,93	0,59	0,70
10	Solok Selatan	1,23	0,89	1,03	0,84	0,79
11	Dharmasraya	1,21	0,66	0,70	0,89	0,71
12	Pasaman Barat	1,09	1,17	1,22	0,81	0,62
	Kota					
1	Padang	0,55	0,54	0,73	0,63	0,45
2	Kota Solok	0,13	0,62	0,42	0,29	0,27
3	Sawahlunto	0,12	0,29	0,27	0,23	0,07
4	Padang Panjang	0,66	0,94	0,88	0,53	0,46
5	Bukittinggi	1,05	0,57	0,39	0,56	0,56
6	Payakumbuh	0,87	0,75	0,71	0,46	0,71
7	Pariaman	0,90	0,59	0,68	0,49	0,49
	SUMATERA BARAT (Provinsi)	1,10	1,00	1,04	0,94	0,92

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/> diakses 2021

Selama periode 2016-2020 indeks kedalaman kemiskinan Kota Solok menunjukkan kecenderungan menurun. Data indeks kedalaman kemiskinan Kota Solok diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan angka paling rendah. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Solok pada tahun 2020 sebesar 0,27. Kondisi ini menempatkan indeks kedalaman kemiskinan Kota Solok menempati peringkat indeks kedua terendah atau diatas Kota Sawahlunto sebesar 0,07. Bahkan jika dibandingkan dengan capaian indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, indeks kedalaman kemiskinan Kota Solok melampaui capaian indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

4.5.3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Selain informasi indeks kedalaman kemiskinan, perancangan strategi pembangunan ekonomi terpadu juga memerlukan informasi indeks keparahan kemiskinan (P2). Berbeda dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi penyebaran pengeluaran diantara

penduduk miskin. Tinggi atau rendahnya nilai indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan yang tinggi atau rendah diantara penduduk miskin.

Table 4.8.
Indeks Keparahhan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kabupaten					
1	Kepulauan Mentawai	0,60	0,70	0,61	0,45	0,77
2	Pesisir Selatan	0,27	0,25	0,13	0,13	0,14
3	Kab,Solok	0,25	0,20	0,35	0,12	0,35
4	Sijunjung	0,28	0,23	0,17	0,22	0,27
5	Tanah Datar	0,15	0,11	0,19	0,06	0,06
6	Padang Pariaman	0,38	0,23	0,29	0,21	0,11
7	Agam	0,19	0,20	0,31	0,13	0,17
8	Lima Puluh Kota	0,21	0,31	0,24	0,07	0,14
9	Pasaman	0,05	0,15	0,22	0,11	0,11
10	Solok Selatan	0,31	0,17	0,23	0,21	0,15
11	Dharmasraya	0,30	0,14	0,15	0,20	0,13
12	Pasaman Barat	0,23	0,27	0,30	0,17	0,09
	Kota					
1	Padang	0,11	0,11	0,17	0,18	0,09
2	Kota Solok	0,01	0,23	0,09	0,04	0,04
3	Sawahlunto	0,01	0,07	0,07	0,05	0,00
4	Padang Panjang	0,11	0,22	0,22	0,09	0,08
5	Bukittinggi	0,30	0,10	0,06	0,12	0,20
6	Payakumbuh	0,19	0,12	0,15	0,06	0,14
7	Pariaman	0,22	0,14	0,16	0,07	0,10
SUMATERA BARAT (Provinsi)		0,24	0,23	0,24	0,21	0,20

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/> diakses 2021

Selama periode 2016-2020, tidak jauh berbeda dengan P1, indeks keparahan kemiskinan Kota Solok juga memperlihatkan angka kedua terendah diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Indeks keparahan kemiskinan Kota Solok telah mencapai 0,082 setelah Kota Sawahlunto yang mencapai 0,04. Selama lima tahun terakhir Kota Solok telah mampu mempertahankan indeks keparahan kemiskinan yang rendah dan cenderung stabil. Data indeks keparahan kemiskinan Kota Solok meningkat hanya pada tahun 2017 dimana tercatat 0,23. Capaian indeks keparahan kemiskinan ini sama dengan capaian Provinsi Sumatera Barat.

4.6. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi terpadu tidak terpisahkan dari pembangunan inklusif. Pengukuran pembangunan inklusif tergambar pada indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif menyatakan

ukuran komprehensif dalam melihat dan mengukur tingkat inklusivitas dari pembangunan. Analisis IPEI Kota Solok memanfaatkan IPEI yang dipublikasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas. IPEI bersandar pada tiga pilar (pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan) dan delapan sub-pilar utama serta 21 indikator.

Tabel 4.9
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2020

No	Wilayah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten						
1	Kepulauan Mentawai	4,19	4,25	4,38	4,29	4,29
2	Pesisir Selatan	5,04	5,01	5,10	5,28	5,14
3	Kab.Solok					
4	Sijunjung	5,00	5,04	5,11	5,26	5,20
5	Tanah Datar	5,38	5,46	5,51	5,59	5,45
6	Padang Pariaman	5,09	5,06	5,02	5,05	4,93
7	Agam	5,33	5,35	5,25	5,34	5,15
8	Lima Puluh Kota	5,08	5,06	5,03	5,21	5,11
9	Pasaman	4,95	5,14	5,18	5,24	5,10
10	Solok Selatan	4,84	4,91	4,96	5,01	4,97
11	Dharmasraya	5,26	5,31	5,34	5,43	5,37
12	Pasaman Barat	5,17	5,24	5,25	5,28	5,23
Kota						
1	Padang	5,93	5,94	5,98	6,03	5,94
2	Kota Solok	6,29	6,38	6,45	6,41	6,36
3	Sawahlunto	5,49	5,50	5,40	5,44	5,34
4	Padang Panjang	5,89	6,04	6,10	6,16	5,86
5	Bukittinggi	6,14	6,14	6,18	6,35	6,25
6	Payakumbuh	5,87	5,97	5,95	6,17	5,89
7	Pariaman	5,79	5,94	5,93	5,97	5,81
SUMATERA BARAT (Provinsi)		5,97	5,95	5,91	6,13	5,65
Indonesia		5,64	5,75	5,75	5,95	5,52

Sumber: Bappenas, diakses 2021

Dalam rentang waktu 2016-2020, indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Solok memperlihatkan kecenderungan berfluktuasi. Pada tahun 2016 IPEI Kota Solok sebesar 6,29 poin meningkat menjadi 6,45 poin pada tahun 2018 dan turun kembali menjadi 6,38 poin pada tahun 2020. IPEI Kota Solok memperlihatkan angka paling tinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Bahkan capaian IPEI Kota Solok melebihi capaian IPEI Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Kategori capaian IPEI Kota Solok adalah memuaskan yang

ditunjukkan dengan nilai IPEI antara 4 dan 7. Capaian ini mengindikasikan pembangunan ekonomi Kota Solok lebih inklusif dibandingkan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat, dan nasional. Tingginya capaian IPEI Kota Solok juga menyatakan keberhasilan pemerintah daerah Kota Solok dalam melaksanakan program-program pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar-kelompok dan wilayah. Capaian ini penting dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan melalui pembangunan ekonomi terpadu.

4.7. Potensi Ekonomi Daerah

Penyusunan strategi pembangunan ekonomi terpadu memerlukan data dan informasi potensi ekonomi daerah. Basis pembangunan daerah adalah potensi ekonomi daerah. Penggalan data dan informasi potensi daerah akan sangat membantu dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi daerah. Data dan informasi potensi ekonomi daerah diupayakan menyajikan sektor sektor ekonomi yang memiliki ketangguhan dan kemampuan yang tinggi sebagai tumpuan pembangunan ekonomi daerah. Penggalan data dan informasi potensi daerah ditujukan pada sektor sektor ekonomi yang dapat menjadi tulang punggung penggerak perekonomian daerah. Dalam menganalisis potensi ekonomi daerah Kota Solok mengacu pada tiga unit analisis yang biasa digunakan, yaitu perhitungan tipologi klassen (*Tipology Klassen*), *locationt quotient* (LQ), dan *shiftshare*. Dari hasil perhitungan ketiga metode dilakukan analisis gabungan (*overlay*).

4.7.1. Tipology Klassen

Tipologi Klassen berguna untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi Kota Solok. Hasil perhitungan tipologi Klassen

diklasifikasikan menjadi empat kuadran, yaitu sekto cepat maju dan cepat tumbuh atau sektor unggulan (*high growth and high share*), sektor maju atau unggulan tetapi tertekan (*high growth but low share*), sektor berkembang cepat atau potensial dan masih bisa dikembangkan (*low growth but high share*), dan sektor relatif tertinggal atau tidak potensial (*low growth and low share*).

Tabel 4.10. Perhitungan Tipologi Klassen Kota Solok, 2016-2020

Lapangan Usaha PDRB	Perhitungan Tipologi Klassen				Kuadran	Keterangan
	Kij	Kin	Rij	Rin		
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0.054	0.225	1.826	2.530	KW IV	Bukan Sektor Potensial
Pertambangan, Penggalian	0.006	0.041	0.900	2.766	KW IV	Bukan Sektor Potensial
Industri Pengolahan	0.053	0.101	0.359	0.813	KW IV	Bukan Sektor Potensial
Pengadaan Listrik dan Gas	0.001	0.001	2.858	3.300	KW IV	Bukan Sektor Potensial
Pengadaan Air, Daur Ulang	0.002	0.001	3.877	3.482	KW I	Unggulan dan Tumbuh Cepat
Konstruksi	0.124	0.092	4.379	5.273	KW III	Potensial dan Masih Bisa Dikembangkan
Perdagangan, Reparasi	0.252	0.158	4.570	5.011	KW III	Potensial dan Masih Bisa Dikembangkan
Transportasi, Pergudangan	0.163	0.117	3.892	1.987	KW I	Unggulan dan Tumbuh Cepat
Akomodasi, Makan Minum	0.020	0.011	4.039	3.755	KW I	Unggulan dan Tumbuh Cepat
Informasi, Komunikasi	0.081	0.073	8.562	9.030	KW III	Potensial dan Masih Bisa Dikembangkan
Keuangan, Asuransi	0.042	0.029	2.923	2.950	KW III	Potensial dan Masih Bisa Dikembangkan
Real Estat	0.025	0.020	3.761	4.304	KW III	Potensial dan Masih Bisa Dikembangkan
Jasa Perusahaan	0.000	0.004	3.826	3.561	KW II	Unggulan dan Pertumbuhan Tertekan
Pemerintahan, Jaminan Sosial	0.083	0.056	3.366	4.339	KW III	Potensial dan Masih Bisa Dikembangkan
Jasa Pendidikan	0.051	0.039	7.333	7.589	KW III	Potensial dan Masih Bisa Dikembangkan
Jasa Kesehatan, Keg Sosial	0.015	0.014	6.143	7.542	KW III	Potensial dan Masih Bisa Dikembangkan
Jasa Lainnya	0.028	0.017	3.534	4.510	KW III	Potensial dan Masih Bisa Dikembangkan

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan tipologi Klassen Kota Solok selama periode 2016-2020 ditemukan beberapa klasifikasi sektor perekonomian, yakni bukan sektor potensial, unggulan dan tumbuh cepat, potensial dan masih bisa dikembangkan dan unggulan tetapi pertumbuhan tertekan. Sektor ekonomi dengan klasifikasi sektor unggulan dan tumbuh cepat adalah sektor pengadaan air dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor akomodasi dan makan minum. Selain itu, terdapat klasifikasi sektor unggulan dan tertekan, yaitu sektor jasa perusahaan. Pada umumnya, klasifikasi sektor ekonomi adalah potensial dan masih bisa dikembangkan, antara lain sektor kontruksi, sektor perdagangan dan reparasi, sektor informasi dan komunikasi, sektor keuangan dan asuransi, sektor pemerintahan dan jaminan sosial, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Namun perhitungan

tipologi Klassen juga menemukan sektor dengan klasifikasi tidak potensial, yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, dan sektor pengadaan listrik, air dan gas.

4.7.2. Location Quotient (LQ)

Teori *Location Quotient* (LQ) digunakan menganalisis keberagaman basis ekonomi Kota Solok. Hasil perhitungan LQ berguna untuk mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan untuk tujuan perdagangan dengan daerah lain dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Solok sendiri. Hasil perhitungan LQ mengidentifikasi sektor potensial yang dapat dijadikan sebagai sektor prioritas dalam perencanaan pembangunan ekonomi terpadu atau sektor basis. Sektor basis merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Solok. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor yang kurang potensial tetapi dapat berfungsi sebagai penunjang sektor basis yang ada di Kota Solok.

Tabel 4.11. Hasil Perhitungan LQ Kota Solok, 2016-2020

Lapangan Usaha PDRB	Hasil LQ						Kategori
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata	
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0.249	0.245	0.238	0.236	0.237	0.241	Non Basis
Pertambangan, Penggalan	0.159	0.160	0.154	0.141	0.140	0.151	Non Basis
Industri Pengolahan	0.536	0.527	0.538	0.521	0.510	0.527	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0.520	0.518	0.516	0.505	0.505	0.513	Non Basis
Pengadaan Air, Daur Ulang	1.969	1.955	1.982	1.942	2.028	1.975	Basis
Konstruksi	1.385	1.374	1.359	1.328	1.326	1.354	Basis
Perdagangan, Reparasi	1.629	1.609	1.587	1.558	1.569	1.590	Basis
Transportasi, Pergudangan	1.365	1.362	1.355	1.383	1.491	1.391	Basis
Akomodasi, Makan Minum	1.877	1.843	1.833	1.815	1.920	1.858	Basis
Informasi, Komunikasi	1.127	1.124	1.118	1.110	1.094	1.115	Basis
Keuangan, Asuransi	1.443	1.443	1.443	1.440	1.435	1.441	Basis
Real Estat	1.312	1.309	1.304	1.283	1.280	1.298	Basis
Jasa Perusahaan	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	Non Basis
Pemerintahan, Jaminan Sosial	1.507	1.496	1.484	1.445	1.445	1.476	Basis
Jasa Pendidikan	1.316	1.299	1.286	1.283	1.294	1.295	Basis
Jasa Kesehatan, Keg Sosial	1.087	1.065	1.063	1.034	1.019	1.053	Basis
Jasa Lainnya	1.646	1.616	1.585	1.583	1.595	1.605	Basis

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan LQ Kota Solok selama rentang waktu 2016-2020 memperlihatkan beberapa sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis yang

memiliki nilai koefisien tertinggi adalah sektor pengadaan air dan daur ulang yang diikuti sektor akomodasi, makan dan minum, sektor sektor jasa lainnya, sektor perdagangan dan reparasi, dan sektor transportasi dan pergudangan. Sektor basis yang memiliki koefisien terendah adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang diikuti sektor informasi dan komunikasi. Sektor basis seperti sektor perdagangan dan reparasi dan sektor transportasi dan pergudangan memiliki kontribusi yang dominan dalam struktur perekonomian Kota Solok. Sektor basis ini telah menopang perekonomian Kota Solok selama periode 2016-2020. Selain sektor basis, perhitungan LQ juga menemukan sektor non basis. Sektor non basis diperlihatkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, air, dan gas, serta sektor jasa perusahaan.

4.7.3. Analisis *Shiftshare*

Selain analisis tipologi Klassen dan LQ, penemuan potensi ekonomi daerah Kota Solok juga menggunakan analisis *shiftshare*. Analisis *shiftshare* mengasumsikan bahwa perubahan struktur dan kinerja perekonomian Kota Solok dipengaruhi oleh struktur perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Perubahan struktur dan kinerja ekonomi Kota Solok terhadap Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh beberapa komponen, antara lain pertumbuhan ekonomi wilayah (N_{ij}), bauran industri atau *proporsional shift* (M_{ij}), dan keunggulan kompetitif atau *differential shift* (C_{ij}).

Tabel 4.12. Nilai Shiftshare Kota Solok, 2016-2020

Lapangan Usaha PDRB	Komponen Shiftshare				Keterangan
	$N_{ij} = E_{ij} \times R_n$	$M_{ij} = E_{ij}(R_{in} - R_n)$	$C_{ij} = E_{ij}(R_{ij} - R_{in})$	$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$	
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	556,263.26	-188,091.41	-102,439.11	265,732.74	Tertekan
Pertambangan, Penggalian	63,966.73	-17,694.99	-31,205.25	15,066.49	Tertekan
Industri Pengolahan	544,022.93	-428,326.36	-64,667.87	51,028.71	Tertekan
Pengadaan Listrik dan Gas	5,585.21	-764.71	-644.64	4,175.87	Tertekan
Pengadaan Air, Daur Ulang	20,225.56	-1,807.10	2,093.53	20,511.99	Berpotensi
Konstruksi	1,280,107.47	485,366.57	-299,311.23	1,466,162.81	Berkembang
Perdagangan, Reparasi	2,593,819.99	806,010.45	-299,016.07	3,100,814.37	Berkembang

Lapangan Usaha PDRB	Komponen Shiftshare				Keterangan
	$N_{ij} = E_{ij} \times R_n$	$M_{ij} = E_{ij} (R_{in} - R_n)$	$C_{ij} = E_{ij} (R_{ij} - R_{in})$	$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$	
Transportasi, Pergudangan	1,672,667.61	-803,351.29	833,520.46	1,702,836.78	Berpotensi
Akomodasi, Makan Minum	205,856.11	-3,662.55	15,267.68	217,461.24	Berpotensi
Informasi, Komunikasi	837,935.38	1,141,254.64	-102,695.64	1,876,494.39	Berkembang
Keuangan, Asuransi	428,699.39	-97,943.22	-2,948.79	327,807.38	Tertekan
Real Estat	261,348.39	32,876.49	-37,098.95	257,125.93	Berkembang
Jasa Perusahaan	1,667.87	-114.16	115.48	1,669.18	Berpotensi
Pemerintahan, Jaminan Sosial	855,759.66	115,428.68	-217,763.03	753,425.31	Berkembang
Jasa Pendidikan	524,627.89	516,822.61	-35,196.17	1,006,254.34	Berkembang
Jasa Kesehatan, Keg Sosial	155,510.14	151,254.74	-56,874.37	249,890.52	Berkembang
Jasa Lainnya	283,595.56	50,940.76	-72,385.10	262,151.21	Berkembang

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan analisis shiftshare Kota Solok dalam periode 2016-2020, tidak ditemukan sektor yang memiliki nilai $M_{ij} > 0$ dan $C_{ij} > 0$. Temuan ini mengindikasikan tidak ada sektor ekonomi yang maju pesat dan berdaya saing. Analisis shiftshare menemukan sebagian besar sektor-sektor ekonomi Kota Solok pada posisi pertumbuhan cepat tetapi tidak berdaya saing atau disebut juga sektor-sektor berkembang. Sektor-sektor ekonomi yang berada pada posisi ini adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan dan reparasi, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estat, sektor pemerintahan dan jaminan sosial, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Selain itu, terdapat beberapa sektor ekonomi yang memiliki daya saing tetapi pertumbuhan lambat. Sektor-sektor ini dapat juga disebut sektor-sektor potensial, diantaranya sektor pengadaan air dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, dan jasa perusahaan. Analisis shiftshare juga menemukan sektor-sektor ekonomi yang pertumbuhan lambat dan tidak berdaya saing, yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, air, dan gas, dan sektor keuangan dan asuransi.

4.7.4. Analisis Overlay

Setelah melakukan perhitungan tipologi Klassen, LQ, dan analisis *shiftshare* maka dapat dilakukan analisis gabungan dari ketiga hasil perhitungan

tersebut (analisis *overlay*). Analisis dilakukan dengan memperhatikan tanda positif (+) atau negatif (-) dari hasil perhitungan LQ dan *shiftshare* serta posisi kuadran dari tipologi Klassen.

Tabel 4.13. Hasil Analisis *Overlay* (*Typology Klassen*, LQ, dan *Shift Share*) Kota Solok, 2016-2020

Lapangan Usaha PDRB	Klassen	Analisis <i>Overlay</i>			Keterangan
		LQ	<i>Shiftshare</i>		
			Mij	Cij	
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	KW IV	-	-	-	Non Unggulan
Pertambangan, Penggalian	KW IV	-	-	-	Non Unggulan
Industri Pengolahan	KW IV	-	-	-	Non Unggulan
Pengadaan Listrik dan Gas	KW IV	-	-	-	Non Unggulan
Pengadaan Air, Daur Ulang	KW I	+	+	+	Unggulan
Konstruksi	KW III	+	+	-	Potensial
Perdagangan, Reparasi	KW III	+	+	-	Potensial
Transportasi, Pergudangan	KW I	+	-	+	Unggulan
Akomodasi, Makan Minum	KW I	+	-	+	Unggulan
Informasi, Komunikasi	KW III	+	+	-	Potensial
Keuangan, Asuransi	KW III	+	-	-	Masih Dapat Dikembangkan
Real Estat	KW III	+	+	-	Potensial
Jasa Perusahaan	KW II	-	-	+	Unggulan Tetapi Tertekan
Pemerintahan, Jaminan Sosial	KW III	+	+	-	Potensial
Jasa Pendidikan	KW III	+	+	-	Potensial
Jasa Kesehatan, Keg Sosial	KW III	+	+	-	Potensial
Jasa Lainnya	KW III	+	+	-	Potensial

Sumber: Data diolah

Hasil analisis *overlay* potensi daerah Kota Solok dalam periode 2016-2020 memperlihatkan beberapa klasifikasi, yakni sektor unggulan, sektor potensial, sektor unggulan tetapi tertekan, sektor yang masih dapat dikembangkan, dan sektor bukan unggulan. Sektor unggulan meliputi sektor pengadaan air dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor akomodasi dan makan minum. Sektor potensial terdiri dari sektor konstruksi, sektor perdagangan dan reparasi, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estat, sektor pemerintahan dan jaminan sosial, sektor jasa pendidikan, sektor kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Selanjutnya, sektor unggulan tetapi tertekan yaitu sektor jasa perusahaan. Sementara sektor yang masih dapat dikembangkan adalah sektor keuangan dan asuransi. Namun terdapat beberapa sektor bukan unggulan, diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan

dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor pengadaan listrik, air, dan gas.

Walaupun telah dilakukan analisis *overlay* dalam melakukan identifikasi potensi ekonomi Kota Solok dengan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kelompok sektor unggulan dan non unggulan. Analisis *overlay* memiliki kelemahan dimana tidak mempertimbangkan keterkaitan antar sektor sehingga analisis ini tidak dapat mengidentifikasi peran sektor bersangkutan dalam menarik (*backward linkages*) dan mendorong (*forward linkages*) sektor lainnya. Oleh karena itu, analisis *input-output* Kota Solok menjadi penting dalam menemukan keterpaduan antar sektor-sektor ekonomi.

4.8. Analisis Input-Output Kota Solok

4.8.1. Konstruksi Tabel Input Output Kota Solok

Tabel Input-Output (I-O) Kota Solok dikonstruksi berdasarkan tabel Input-Output Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Metode yang digunakan untuk memprediksi matrik transaksi tabel I-O Kota Solok adalah metode RAS. Sementara itu, matriks output antara, input antara, permintaan akhir, nilai tambah bruto, dan total output Kota Solok diperoleh dengan metode LQ (Location Quotient) yaitu dengan membandingkan peran ekonomi dari masing-masing sektor di Kota Solok dengan peran ekonomi masing-masing sektor di provinsi Sumatera Barat. Tahun dasar yang digunakan untuk menghitung table I-O Kota Solok dalam kajian ini adalah tahun 2019.

4.8.2. Analisis Dampak dan Pengganda

A. Deskripsi Perekonomian Kota Solok Berdasarkan Tabel Input-Output

Tabel Input-Output (I-O) Kota Solok menyediakan informasi yang menunjukkan interaksi antara suatu sektor dengan sektor-sektor lainnya dalam

perekonomian Kota Solok. Tabel I-O Kota Solok juga menunjukkan keterkaitan kegiatan ekonomi Kota Solok dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Analisis deskriptif I-O Kota Solok membahas struktur permintaan dan penawaran, struktur output, struktur nilai tambah, dan struktur permintaan akhir.

Struktur Permintaan dan Penawaran

Tabel 4.14 dan 4.15 memberikan informasi tentang struktur permintaan dan penawaran Kota Solok. Total produksi domestik Kota Solok mampu menyediakan 83,66% barang dan jasa untuk memenuhi total permintaan Kota Solok. Sementara, sebesar 16,34 persen permintaan Kota Solok dipenuhi dari impor. Permintaan barang dan jasa di kota Solok dapat dikategorikan mejadi permintaan antara, permintaan akhir domestik, dan permintaan ekspor. Sebesar 52,43 persen dari total permintaan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir domestik yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga non-profit, konsumsi pemerintah, investasi, dan perubahan inventori. Sementara itu sebesar 26,49 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan input bagi sektor lain di Kota Solok. Sisanya sebesar 21,08 digunakan untuk eskpor.

Berdasarkan sektor, tidak ada satu sektor pun yang mampu mememenuhi total permintaan tanpa melakukan impor. Sektor yang paling banyak mengimpor untuk memenuhi permintaan akhirnya adalah sektor listrik dan gas yaitu sebesar 44,43 persen. Sementara itu sektor dengan impor paling kecil adalah sektor real estate. Sektor yang paling banyak mengekspor berdasarkan struktur permintaan akhirnya adalah sektor industri pengolahan dan pertambangan dan penggalian. Sektor yang paling sedikit mengekspor dari total permintaan akhirnya adalah sektor Jasa Pendidikan.

Tabel 4.14
Struktur Permintaan dan Penawaran Tabel I-O Kota Solok 2019 (Rp Juta)

Sektor	Permintaan Antara	Permintaan Akhir		Jumlah Permintaan	Impor	Output Domestik	Jumlah Penyediaan
		Domestik	Ekspor				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	63,041.11	69,783.14	78,444.49	211,268.74	17,028.09	194,240.65	211,268.74
Pertambangan dan Penggalian	7,174.28	1,722.75	14,897.91	23,794.93	2,927.95	20,866.98	23,794.93
Industri Pengolahan	62,567.56	91,333.00	263,952.59	417,853.16	75,336.14	342,517.02	417,853.16
Pengadaan Listrik dan Gas	24,968.86	6,008.26	7,457.29	38,434.41	17,075.87	21,358.54	38,434.41
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,414.29	11,742.02	934.91	18,091.22	2,444.26	15,646.95	18,091.22
Konstruksi	72,001.36	758,123.31	125,837.97	955,962.64	198,616.26	757,346.38	955,962.64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	296,378.43	390,435.51	213,865.48	900,679.42	80,900.24	819,779.17	900,679.42
Transportasi dan Pergudangan	474,717.84	259,581.71	223,880.66	958,180.21	238,307.95	719,872.26	958,180.21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35,071.78	352,830.42	74,061.61	461,963.81	89,185.75	372,778.06	461,963.81
Informasi dan Komunikasi	152,969.21	95,087.87	44,793.85	292,850.93	30,316.74	262,534.19	292,850.93
Jasa Keuangan dan Asuransi	119,923.59	43,120.35	16,564.41	179,608.35	15,027.87	164,580.49	179,608.35
Real Estate	66,748.37	81,844.48	14,513.71	163,106.56	8,463.11	154,643.46	163,106.56
Jasa Perusahaan	1,701.43	101.38	142.08	1,944.89	284.92	1,659.97	1,944.89
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,495.49	262,614.96	30,217.46	313,327.90	44,291.06	269,036.84	313,327.90
Jasa Pendidikan	6,286.42	266,397.77	7,935.85	280,620.04	34,767.59	245,852.45	280,620.04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,449.09	63,030.85	15,750.44	82,230.37	15,786.14	66,444.23	82,230.37
Jasa Lainnya	35,297.13	112,714.79	18,940.82	166,952.75	22,355.98	144,596.77	166,952.75
Jumlah	1,448,206.23	2,866,472.56	1,152,191.53	5,466,870.32	893,115.92	4,573,754.40	5,466,870.32

Sumber: Data diolah

Tabel 4.15
Distribusi Struktur Permintaan dan Penawaran Tabel I-O Kota Solok (%)

Sektor	Permintaan Antara	Permintaan Akhir		Jumlah Permintaan	Impor	Output Domestik	Jumlah Penyediaan
		Domestik	Ekspor				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.84	33.03	37.13	100.00	8.06	91.94	100.00
Pertambangan dan Penggalian	30.15	7.24	62.61	100.00	12.30	87.70	100.00
Industri Pengolahan	14.97	21.86	63.17	100.00	18.03	81.97	100.00
Pengadaan Listrik dan Gas	64.96	15.63	19.40	100.00	44.43	55.57	100.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.93	64.90	5.17	100.00	13.51	86.49	100.00
Konstruksi	7.53	79.30	13.16	100.00	20.78	79.22	100.00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32.91	43.35	23.74	100.00	8.98	91.02	100.00
Transportasi dan Pergudangan	49.54	27.09	23.37	100.00	24.87	75.13	100.00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.59	76.38	16.03	100.00	19.31	80.69	100.00
Informasi dan Komunikasi	52.23	32.47	15.30	100.00	10.35	89.65	100.00
Jasa Keuangan dan Asuransi	66.77	24.01	9.22	100.00	8.37	91.63	100.00
Real Estate	40.92	50.18	8.90	100.00	5.19	94.81	100.00
Jasa Perusahaan	87.48	5.21	7.31	100.00	14.65	85.35	100.00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.54	83.81	9.64	100.00	14.14	85.86	100.00
Jasa Pendidikan	2.24	94.93	2.83	100.00	12.39	87.61	100.00

Sektor	Permintaan Antara	Permintaan Akhir		Jumlah Permintaan	Impor	Output Domestik	Jumlah Penyediaan
		Domestik	Ekspor				
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.19	76.65	19.15	100.00	19.20	80.80	100.00
Jasa Lainnya	21.14	67.51	11.35	100.00	13.39	86.61	100.00
Jumlah	26.49	52.43	21.08	100.00	16.34	83.66	100.00

Sumber: Data diolah

Struktur Output

Output adalah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi Kota Solok. Struktur output Kota Solok memberikan informasi yang penting terkait dengan seberapa besar kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam memenuhi permintaan akhir Kota Solok. Tiga sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap perekonomian Kota Solok adalah sektor konstruksi (16,56 persen), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (17,92 persen), dan sektor transportasi dan pergudangan (15,74 persen). Sementara itu, sektor-sektor dengan kontribusi yang kecil adalah jasa perusahaan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, pertambangan dan penggalan, dan pengadaan listrik dan gas.

Tabel. 4.16
Struktur Output tabel I-O Kota Solok

Sektor	Output Domestik (Juta Rupiah)	Peranan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	194,240.65	4.25
Pertambangan dan Penggalan	20,866.98	0.46
Industri Pengolahan	342,517.02	7.49
Pengadaan Listrik dan Gas	21,358.54	0.47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,646.95	0.34
Konstruksi	757,346.38	16.56
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	819,779.17	17.92
Transportasi dan Pergudangan	719,872.26	15.74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	372,778.06	8.15
Informasi dan Komunikasi	262,534.19	5.74
Jasa Keuangan dan Asuransi	164,580.49	3.60
Real Estate	154,643.46	3.38
Jasa Perusahaan	1,659.97	0.04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	269,036.84	5.88
Jasa Pendidikan	245,852.45	5.38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,444.23	1.45
Jasa Lainnya	144,596.77	3.16
Jumlah	4,573,754	100

Sumber: Data diolah

Struktur Nilai Tambah Bruto

Nilai tambah bruto merupakan balas jasa terhadap faktor produksi yang tercipta dari kegiatan produksi. Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor akan tergantung dari besarnya nilai produksi dan biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi. Dalam tabel I-O, nilai tambah tidak hanya hasil dari pengurangan output dengan input antara atau biaya produksi tetapi juga dari penjumlahan upah dan gaji, surplus usaha (sewa, bunga dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung neto. Sejalan dengan kontribusi sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor transportasi dan pergudangan terhadap pembentukan output, sektor-sektor tersebut juga berkontribusi besar dalam peningkatan NTB Kota Solok. Peran sektor-sektor tersebut masing-masingnya adalah 12,95 persen, 20,85 persen, dan 14,98 persen.

Tabel. 4.17
Struktur Nilai Tambah Bruto tabel I-O Kota Solok

Sektor	Nilai Tambah Bruto (Juta Rupiah)	Peranan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	168,590.71	5.53
Pertambangan dan Penggalian	16,619.18	0.55
Industri Pengolahan	160,226.48	5.26
Pengadaan Listrik dan Gas	5,046.84	0.17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,598.43	0.35
Konstruksi	394,626.59	12.95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	635,277.80	20.85
Transportasi dan Pergudangan	456,544.22	14.98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	217,083.86	7.12
Informasi dan Komunikasi	170,622.17	5.60
Jasa Keuangan dan Asuransi	138,967.12	4.56
Real Estate	120,748.18	3.96
Jasa Perusahaan	1,097.84	0.04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	196,870.66	6.46
Jasa Pendidikan	204,206.67	6.70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45,952.37	1.51
Jasa Lainnya	104,312.72	3.42
Jumlah	3,047,391.83	100.00

Sumber: Data diolah

Struktur permintaan akhir

Struktur permintaan akhir terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga luar negeri non-profit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi, perubahan stok dan net ekspor. Berdasarkan tabel I-O

Kota Solok, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan perekonomian. Kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 45,13 persen dari total nilai permintaan akhir. Fakta ini mencerminkan bahwa, konsumsi masih merupakan determinan utama dalam perekonomian Kota Solok. Komponen lainnya yang juga berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kota Solok adalah pembentukan modal tetap bruto dengan kontribusi sebesar 30,64 persen. Sementara itu, peranan konsumsi pemerintah mencapai 14,54 persen. Komponen net ekspor kota Solok menunjukkan nilai yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Solok mengekspor lebih banyak dibanding mengimpor. Dengan kata lain Kota Solok telah melakukan perluasan pasar dengan melakukan ekspor. Kedepannya, perluasan ekspor perlu lebih ditingkatkan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kunci perluasan ekspor adalah meningkatkan daya saing produk.

Tabel. 4.18
Struktur Permintaan Akhir tabel I-O Kota Solok

Komponen	Nilai (Juta Rupiah)	Kontribusi (%)
Konsumsi Rumah Tangga	1,410,784.77	45.13
Konsumsi LNPRT	43,909.38	1.40
Konsumsi Pemerintah	454,639.51	14.54
Pembentukan Modal Tetap Bruto	957,961.33	30.64
Net Ekspor	259,075.61	8.29
Jumlah	3126370.611	100

Sumber: Data diolah

B. Analisis Dampak

Analisis dampak permintaan akhir terhadap output masing-masing sektor perekonomian Kota Solok dilakukan berdasarkan empat skenario. Skenario dalam kajian ini hanya fokus pada perubahan tiga sektor yang memiliki peranan terbesar dalam perekonomian Kota Solok. Skenario pertama mengasumsikan bahwa permintaan akhir ketiga sektor terbesar tersebut naik sebesar 5% persen. Skenario kedua mengasumsikan bahwa hanya permintaan akhir sektor konstruksi yang naik sebesar 5 persen. Skenario ketiga mengasumsikan bahwa hanya permintaan akhir

sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang naik sebesar 5 persen. Skenario keempat mengasumsikan hanya permintaan akhir sektor transportasi dan pergudangan yang naik sebesar 5 persen. Pemilihan scenario dalam analisis dampak tidak hanya terbatas pada keempat scenario diatas namun juga dapat dilakukan berdasarkan keinginan perencana atau pembuat kebijakan.

Table 4.19 menunjukkan hasil simulasi scenario satu hingga empat. Pada scenario pertama, jika diasumsikan permintaan akhir tiga sektor terbesar naik sebesar lima satuan, maka kenaikan tersebut akan berdampak secara langsung pada sektor tersebut dan sektor lainnya. Sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan. Sementara itu sektor dengan kenaikan paling kecil adalah sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang. Analisis yang sama juga berlaku untuk scenario dua hingga scenario empat.

Tabel. 4.19
Dampak Kenaikan Permintaan Akhir terhadap Sektor-Sektor Ekonomi Kota Solok

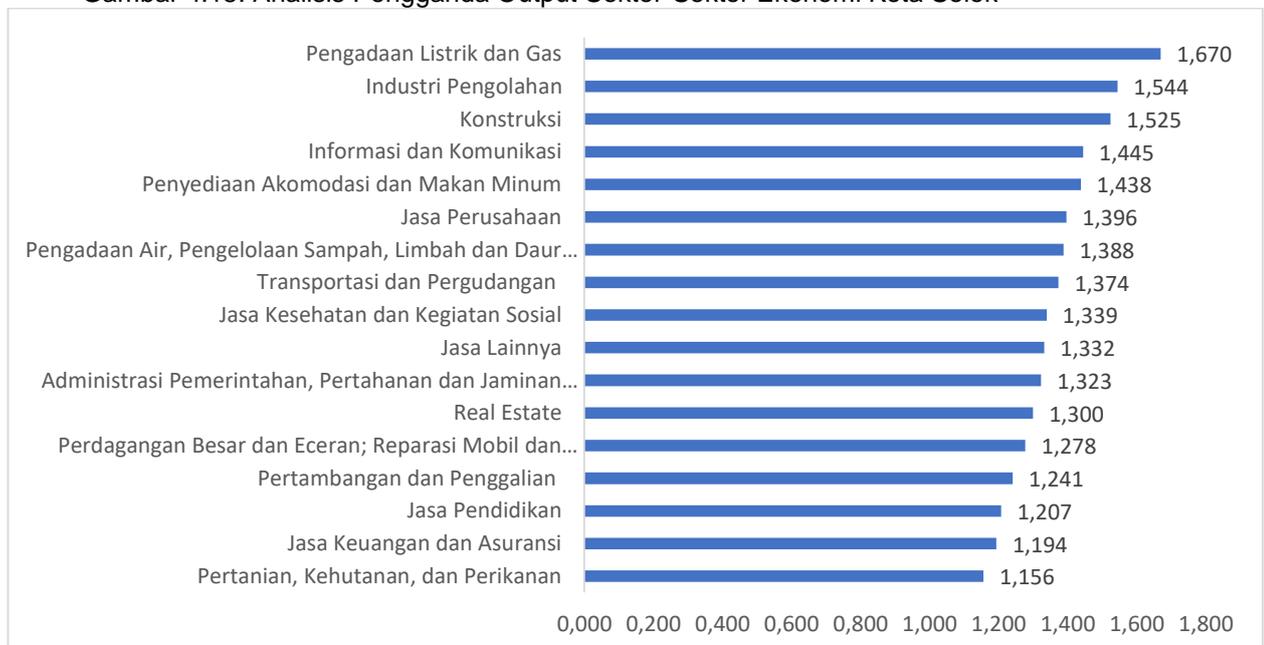
Sektor	Skenario			
	1	2	3	4
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.132	0.098	0.012	0.022
Pertambangan dan Penggalian	0.239	0.231	0.004	0.004
Industri Pengolahan	0.468	0.370	0.037	0.061
Pengadaan Listrik dan Gas	0.135	0.039	0.033	0.062
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.009	0.002	0.002	0.004
Konstruksi	5.194	5.097	0.058	0.040
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.942	0.357	5.136	0.450
Transportasi dan Pergudangan	7.002	0.984	0.526	5.492
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.076	0.020	0.016	0.040
Informasi dan Komunikasi	0.627	0.135	0.180	0.312
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.318	0.065	0.153	0.100
Real Estate	0.305	0.084	0.145	0.076
Jasa Perusahaan	0.240	0.092	0.054	0.094
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.058	0.012	0.011	0.036
Jasa Pendidikan	0.027	0.005	0.005	0.017
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.023	0.004	0.005	0.015
Jasa Lainnya	0.085	0.029	0.013	0.042

Sumber: Data diolah

C. Analisis Pengganda

Terdapat tiga analisis pengganda dalam model input output yaitu pengganda output, pengganda pendapatan, dan pengganda tenaga kerja. Analisis pengganda untuk Kota Solok hanya dilakukan terhadap pengganda output dan pengganda pendapatan. Ketiadaan data penggunaan tenaga kerja per sektor tidak memungkinkan untuk melakukan analisis pengganda tenaga kerja. Analisis pengganda output menjelaskan tentang seberapa besar kenaikan output disektor tersebut meningkat jika permintaan akhir pada sektor tersebut meningkat. Gambar 4.15 menunjukkan bahwa pengganda output paling besar adalah pengadaan listrik dan gas disusul oleh industri pengolahan dan konstruksi pada urutan kedua dan ketiga. Sebagai sektor dengan kontribusi paling besar terhadap perekonomian, pengganda output transportasi dan pergudangan dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor relative rendah dibanding beberapa sektor lainnya. Sementara itu, sektor dengan pengganda output paling kecil adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Gambar 4.15. Analisis Pengganda Output Sektor-Sektor Ekonomi Kota Solok

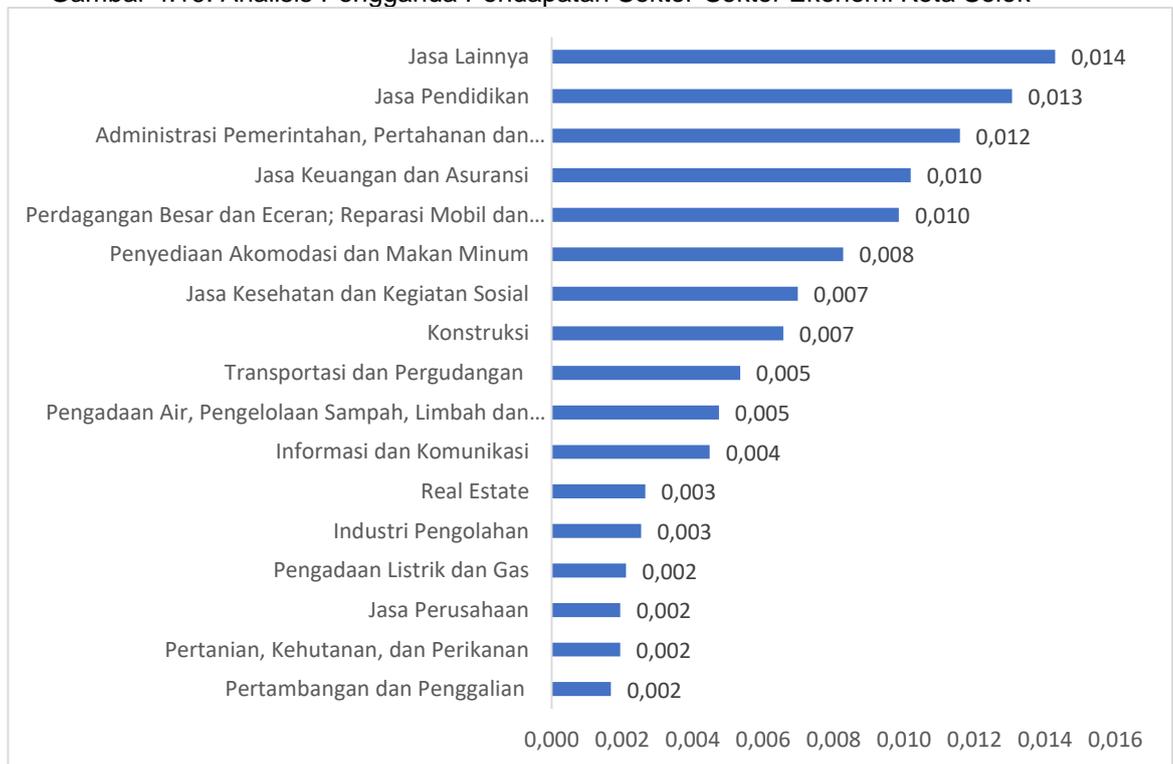


Sumber: Data diolah

Analisis pengganda pendapatan menjelaskan tentang kenaikan pendapatan masyarakat pada sektor tertentu jika terdapat kenaikan permintaan

akhir pada sektor tersebut. Pengganda pendapatan terbesar berdasarkan I-O Kota Solok adalah jasa kemasyarakatan. Sama halnya dengan pengganda output, tiga sektor utama di Kota Solok juga memiliki pengganda pendapatan yang relatif kecil dibanding beberapa sektor lainnya. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan pengganda pendapatan kedua paling kecil setelah sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini mungkin saja mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat di kedua sektor ini relative lebih kecil dibanding sektor lainnya.

Gambar 4.16. Analisis Pengganda Pendapatan Sektor-Sektor Ekonomi Kota Solok



Sumber: Data diolah

4.8.3. Analisis Sektor Unggulan

Salah satu manfaat dari Tabel I-O adalah memberikan informasi mengenai sektor-sektor unggulan dan non unggulan. Sektor-sektor unggulan daerah dapat ditelusuri melalui analisis keterkaitan kebelakang (backward linkage) atau disebut

daya penyebaran dan keterkaitan kedepan (forward linkage) atau disebut derajat kepekaan masing-masing sektor ekonomi. Sektor yang memiliki keterkaitan lebih tinggi dari rata-rata keterkaitan kebelakang dan keterkaitan kedepan merupakan sektor kunci yang menjadi motor penggerak perekonomian.

A. Keterkaitan Kebelakang (backward linkage)

Peningkatan output dari sektor tertentu mendorong peningkatan output terhadap sektor lainnya. Peningkatan output sektor-sektor lainnya dapat dilakukan melalui peningkatan permintaan inputnya sendiri dan input sektor lain. Ini memberikan indikasi bahwa sektor tersebut akan meminta output sektor lain sebagai inputnya. Ini berarti pula bahwa sektor lain harus meningkatkan outputnya. Kondisi ini akan terus berlanjut sehingga terjadi keterkaitan antara suatu sektor dengan sektor lainnya. Keterkaitan semacam ini sering dikenal dengan keterkaitan kebelakang (backward linkage).

Berdasarkan nilai keterkaitan kebelakang, sektor-sektor ekonomi Kota Solok yang memiliki keterkaitan yang tinggi (diatas keterkaitan rata-rata) adalah Pengadaan Listrik dan Gas, Industri Pengolahan, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Penyedia Akomodasi Makan dan Minum, Jasa Perusahaan, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Transportasi dan Pergudangan. Ini berarti bahwa kenaikan satu unit sektor-sektor tersebut memerlukan output sektor lainnya lebih besar dari nilai rata-rata per unit masing-masing sektor ekonomi. Output tersebut diperlukan sebagai input sehingga mengakibatkan peningkatan penggunaan output seluruh sektor ekonomi. Sebagai contoh, sektor Pengadaan Listrik dan Gas memiliki indeks keterkaitan kebelakang sebesar 1.2261. Hal ini berarti kenaikan satu satuan output sektor Pengadaan Listrik dan Gas akan menaikkan penggunaan output seluruh perekonomian

sebesar 1.2261 unit. Interpretasi yang sama dapat pula dilakukan untuk menganalisis daya penyebaran sektor-sektor lainnya.

B. Keterkaitan Kedepan (forward linkage)

Selain keterkaitan kebelakang, jenis keterkaitan lainnya adalah keterkaitan kedepan. Keterkaitan kedepan menghitung total output yang tercipta dari meningkatnya output suatu sektor melalui mekanisme distribusi output. Jika terjadi suatu peningkatan output produksi, maka tambahan output akan didistribusikan ke sektor-sektor produksi lainnya tak terkecuali sektor itu sendiri. Kondisi ini terus berlanjut dalam suatu perekonomian sehingga terjadi keterkaitan antara suatu sektor dengan sektor lainnya. Keterkaitan semacam ini disebut pula keterkaitan kedepan (forward linkage).

Berdasarkan hasil penghitungan, sektor-sektor yang memiliki keterkaitan kedepan diatas nilai rata-rata indeks derajat kepekaan adalah sektor Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Pemerintahan, pengadaan listrik dan gas, pertanian kehutanan dan perikanan, dan jasa keuangan dan asuransi. Sebagai contoh, sektor yang memiliki indeks derajat kepekaan paling tinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 1.6741. Ini berarti peningkatan satu unit sektor transportasi dan pergudangan meningkatkan output perekonomian sebesar sebesar 1.6741 unit.

Tabel. 4.20
Indeks Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan

Sektor	Forward Linkage	Sektor	Backward Linkage
Transportasi dan Pergudangan	1.6741	Pengadaan Listrik dan Gas	1.2261
Informasi dan Komunikasi	1.3359	Industri Pengolahan	1.1341
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.2488	Konstruksi	1.1195
Pengadaan Listrik dan Gas	1.2240	Informasi dan Komunikasi	1.0609
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.1534	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.0560
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.0250	Jasa Perusahaan	1.0254
Industri Pengolahan	0.9904	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.0193

Sektor	Forward Linkage	Sektor	Backward Linkage
Konstruksi	0.9575	Transportasi dan Pergudangan	1.0086
Jasa Perusahaan	0.9399	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.9835
Real Estate	0.9214	Jasa Lainnya	0.9782
Jasa Lainnya	0.8282	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.9717
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.8149	Real Estate	0.9545
Pertambangan dan Penggalian	0.8095	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.9382
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.8016	Pertambangan dan Penggalian	0.9115
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.7697	Jasa Pendidikan	0.8867
Jasa Pendidikan	0.7582	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.8767
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.7475	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.8491

Sumber: Data diolah

Tabel. 4.21
Sektor-sektor unggulan

		Keterkaitan ke Depan (Forward Linkages)	
		Tinggi	Rendah
Keterkaitan ke Belakang (Backward Linkage)	Tinggi	Transportasi dan Pergudangan Informasi dan komunikasi Pengadaan Listrik dan Gas	Industri Pengolahan Konstruksi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jasa Perusahaan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	Rendah	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate Pertambangan dan Penggalian Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

Sumber: Data diolah

C. Analisis Struktur Perekonomian Kota Solok

Kajian ini menggunakan Multiplier Product Matrix (MPM) untuk melihat struktur (landscape) perekonomian Kota Solok. MPM menunjukkan interaksi antar sektor dalam perekonomian yang menunjukkan seberapa besar keterkaitan suatu sektor dengan sektor lainnya sebagai penyedia input (backward linkage) dan keterkaitan suatu sektor dengan sektor lain sebagai pengguna input (forward linkage) (Amir dan Nazara, 2005). Tabel 4.22 menunjukkan MPM Kota Solok

yang telah diurut berdasarkan nilai terbesar (kiri atas) hingga nilai terkecil (kanan bawah). Urutan ini menunjukkan besaran pengaruh total suatu sektor terhadap perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan nilai MPM keterkaitan terbesar antar sektor diperlihatkan oleh sektor 6 (Konstruksi) dan sektor 13 (Jasa Perusahaan). Lima sektor dengan urutan teratas yang memiliki pengaruh terbesar pada perekonomian Kota Solok secara keseluruhan adalah sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Informasi dan Komunikasi.

Tabel. 4.22
Interaksi Sektor-Sektor dalam Perekonomian Kota Solok

Sektor	13	4	11	10	8	12	7	5	1	2	17	3	14	9	6	16	15
6	0.24	0.22	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
8	0.21	0.19	0.18	0.17	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
3	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
7	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
10	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
9	0.16	0.15	0.14	0.13	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
4	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
17	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
15	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
16	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
5	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
2	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
13	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

Sumber: Data diolah

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan struktur output dan Nilai Tambah Bruto terlihat bahwa perekonomian Kota Solok ditopang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan Transportasi dan Pergudangan.
2. Analisis potensi ekonomi daerah berdasarkan tipologi klasen menyimpulkan bahwa sektor pengadaan air, transportasi dan pergudangan, dan sektor penyedia akomodasi dan makan minum merupakan sektor unggulan dan tumbuh cepat. Sementara dua sektor lainnya yang berkontribusi cukup besar (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Konstruksi) terhadap perekonomian Kota Solok dikategorikan sebagai sektor potensial dan masih bisa dikembangkan.
3. Semua sektor yang memiliki kontribusi terbesar (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan Transportasi dan Pergudangan) terhadap perekonomian Kota Solok merupakan sektor basis yang merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Solok

4. Berdasarkan perhitungan analisis *shiftshare* Kota Solok dalam periode 2016-2020, tidak ditemukan sektor yang memiliki nilai $M_{ij} > 0$ dan $C_{ij} > 0$. Temuan ini mengindikasikan tidak ada sektor ekonomi yang maju pesat dan berdaya saing.
5. Analisis *shiftshare* menemukan sebagian besar sektor-sektor ekonomi Kota Solok pada posisi pertumbuhan cepat tetapi tidak berdaya saing atau disebut juga sektor-sektor berkembang. Sektor-sektor ekonomi yang berada pada posisi ini adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan dan reparasi, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estat, sektor pemerintahan dan jaminan sosial, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya.
6. Hasil analisis *overlay* potensi daerah Kota Solok dalam periode 2016-2020 memperlihatkan sektor pengadaan air dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor akomodasi dan makan minum merupakan sektor unggulan.
7. Analisis I-O menjelaskan bahwa pengganda output paling besar di Kota Solok adalah pengadaan listrik dan gas disusul oleh industri pengolahan dan konstruksi pada urutan kedua dan ketiga. Angka ini menjelaskan tentang seberapa besar kenaikan output jika permintaan akhir di sektor tersebut naik sebesar 1 satuan. Sektor dengan pengganda output paling kecil adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
8. Pengganda pendapatan terbesar berdasarkan I-O Kota Solok adalah jasa kemasyarakatan. Sama halnya dengan pengganda output, tiga sektor utama di Kota Solok juga memiliki pengganda pendapatan yang relatif kecil dibanding beberapa sektor lainnya.

9. Sektor yang memiliki Forward Linkage dan Backward Linkage yang tinggi adalah Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, dan Pengadaan Listrik dan Gas.
10. Lima sektor dengan urutan teratas yang memiliki pengaruh terbesar pada perekonomian Kota Solok secara keseluruhan adalah sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Informasi dan Komunikasi.

5.2. Rekomendasi

Prioritas Pembangunan Sebagai Pusat Perdagangan Yang Didukung Oleh Transportasi Dan Pergudangan

Berdasarkan analisis kajian pembangunan ekonomi terpadu Kota Solok, maka kebijakan pembangunan kota solok sebaiknya berlandaskan pada sektor yang berdampak luas terhadap pembangunan ekoomi Kota Solok secara keseluruhan.

Perekonomian Kota Solok sebagian besar ditopang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini terlihat dari konstibusi kedua sektor ini yang cukup besar. Selain itu sektor transportasi dan pergudangan juga memiliki backward dan forward linkage yang tinggi. Walaupun memiliki nilai backward linkage yang rendah, namun sektor perdagangan memiliki nilai forward linkage yang tinggi. Selain itu analisis MPM juga memperlihatkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan juga memilii pengaruh total yang cukup besar pada perekonomian Kota Solok

Kebijakan untuk memprioritaskan pembangunan pada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan juga didukung oleh kondisi geografis Kota Solok. Sebagai daerah perlintasan, Kota Solok harus memiliki sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung distribusi produk sektor-sektor lainnya. Selain itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki keterkaitan kebelakang yang tinggi juga mendukung kondisi geografis Kota Solok sebagai daerah perlintasan. Oleh sebab itu untuk mencapai visi Kota Solok maka kebijakan pembangunan Kota Solok kedepannya dapat diarahkan pada pembangunan sektor perdagangan yang ditopang oleh sektor transportasi dan pergudangan.